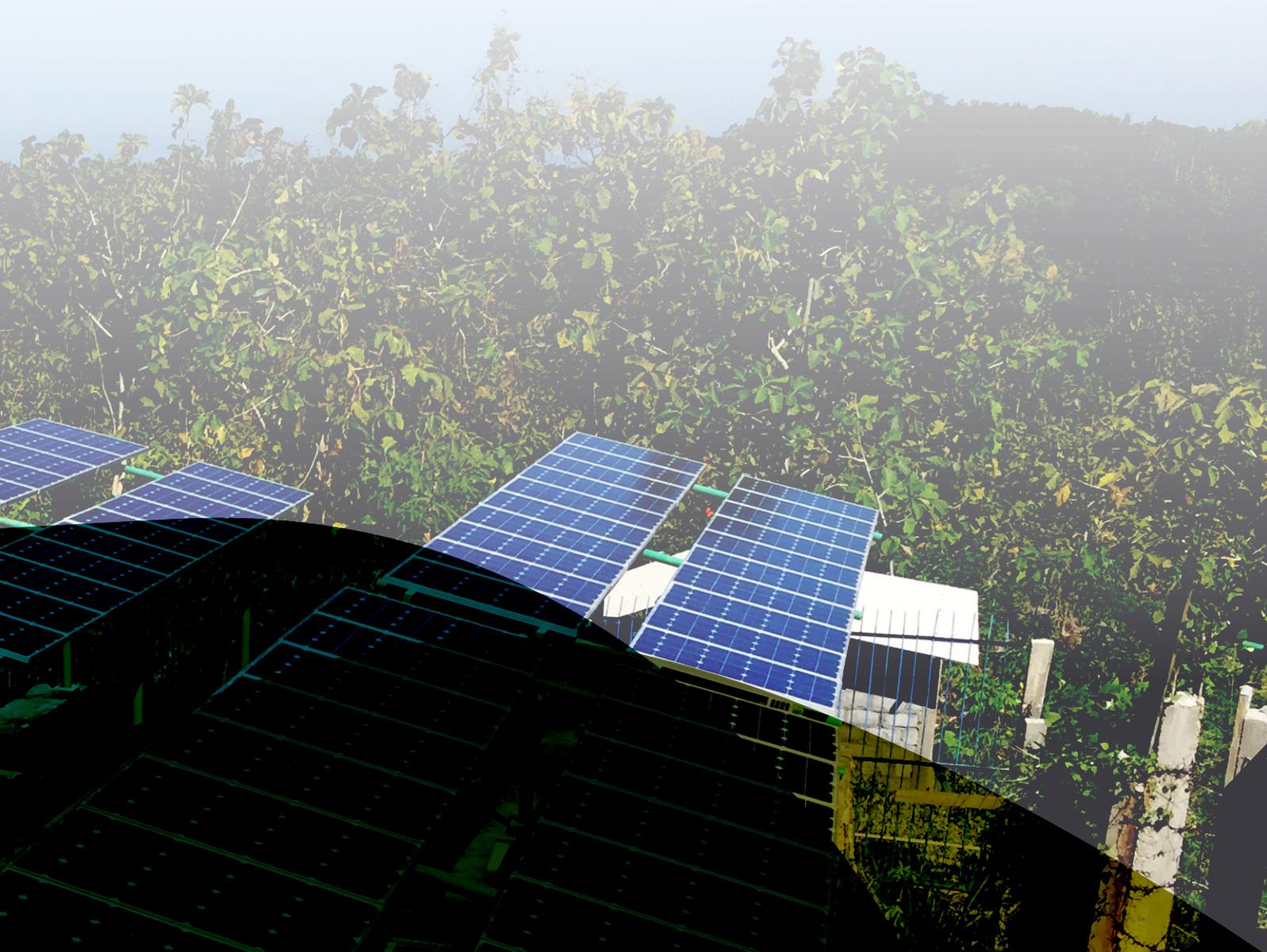




ICCTF
Indonesia Climate Change Trust Fund

LAPORAN 1 TRIWULAN 1

JANUARI - MARET 2019



Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	__2
Rencana Kerja ICCTF Tahun 2019	__3
Progres dan Capaian	__4
 Kelompok Kerja 1: Mitigasi & Adaptasi	__4
 Kelompok Kerja 2: Energi	__18
 Kelompok Kerja 3: Kelautan	__26
Penggalangan Dana (<i>Fundraising</i>)	__30
Komunikasi, <i>Outreach</i> dan Kemitraan	__32
Keuangan dan Audit	__40
Lampiran (<i>Media Coverage</i>)	__42

Ringkasan Eksekutif

Sebagai Lembaga Wali Amanat Nasional (*National Trust Fund*) di bidang perubahan iklim, ICCTF mengelola kegiatan dengan pendanaan APBN dan hibah meliputi hibah USAID, UKCCU dan DANIDA. Kegiatan yang dilaksanakan melalui pendanaan APBN dan DANIDA merupakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan siklus proyek ICCTF, pengembangan *thematic windows*, dukungan terhadap kegiatan perubahan iklim, pengembangan kapasitas ICCTF, komunikasi dan operasional. Sementara kegiatan yang dilaksanakan melalui dana hibah USAID dan UKCCU merupakan kegiatan-kegiatan penanganan perubahan iklim yang dilaksanakan oleh mitra pelaksana ICCTF melalui aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ICCTF pada kuartal pertama ini mencatatkan berbagai kegiatan dan capaian yang telah dilaksanakan pada bulan Januari – Maret 2019. Pada periode ini, ICCTF berfokus pada pelaksanaan beberapa kegiatan, salah satunya adalah kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Tahunan (*Annual Review*) untuk proyek yang dilaksanakan oleh proponent pada tahun 2018, baik bagi proyek yang telah selesai maupun yang masih berjalan. Kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan proponent serta Kementerian/Lembaga terkait ini menjadi ajang dialog dan diskusi produktif antar pemangku kepentingan dalam berbagi pengetahuan dan praktik terbaik, serta saling memberikan masukan untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang dihadapi.

Dalam rangkaian kegiatan *Annual Review* juga dilaksanakan diskusi panel bertajuk “Kebijakan, Capaian dan Tantangan Program Restorasi Gambut di Indonesia” yang membahas upaya-upaya yang telah dilakukan baik oleh Bappenas maupun Badan Restorasi Gambut dalam mengurangi dampak perubahan iklim serta kendala dan tantangan yang dihadapi. Kolaborasi dan komunikasi antar pihak dinilai penting untuk memenuhi target dan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca agar program dan kegiatan dapat berjalan secara selaras dan tidak saling tumpang tindih.

Disamping itu, ICCTF turut berupaya mempromosikan inisiatif kebijakan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) di Indonesia, salah satunya melalui partisipasi dalam mendukung terselenggaranya acara peluncuran laporan kajian pembangunan rendah karbon di Bappenas. Kegiatan terselenggara atas kolaborasi antara Kementerian PPN/Bappenas, United Kingdom Climate Change Unit (UKCCU), Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF),

World Resource Institute Indonesia dan New Climate Economy.

Peluncuran Laporan PRK dilaksanakan pada hari Selasa, 26 Maret 2019 dan dihadiri sekitar 350 peserta dari berbagai Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Pakar dan Universitas, Media, Organisasi Internasional, Mitra Pembangunan, Organisasi Non-Pemerintah dan Pihak Swasta. Kegiatan juga dihadiri oleh duta besar dan pejabat tinggi dari berbagai instansi, antara lain Duta Besar Denmark, Duta Besar Inggris, dan Duta Besar Norwegia, Kepala LKPP, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, serta Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim.

Terdapat beberapa pembelajaran dari pelaksanaan proyek ICCTF sebagai percontohan implementasi PRK, salah satunya adalah proyek ICCTF di Kabupaten Kupang dan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur melalui pengembangan sistem budidaya padi SRI (*System of Rice Intensification*) sebagai alternatif produksi pertanian ramah lingkungan dimana melalui intervensinya sejak tahun 2016, telah berhasil meningkatkan produktivitas padi hampir 200%. Program ini menjadi upaya menstabilkan produksi padi di Indonesia dengan pengelolaan tanaman yang adaptif, sehingga di samping meningkatkan perekonomian petani, juga sekaligus menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Pada periode ini, ICCTF turut melaksanakan serangkaian kegiatan kunjungan ke beberapa lokasi proyek untuk memantau implementasi di lapangan, baik dari sisi program maupun keuangan. Disamping untuk memastikan bahwa implementasi proyek oleh proponent berjalan secara efektif dan efisien berdasarkan *Standar Operation Procedur* (SOP) yang ada, kegiatan juga bertujuan untuk memvalidasi kesesuaian dokumen pertanggungjawaban dan pelaksanaan kegiatan di lapangan dengan pelaporan keuangan dan program yang disampaikan mitra pelaksana kepada Sekretariat ICCTF.

Berbagai upaya penggalangan dana terus dilakukan ICCTF untuk menggali potensi pembiayaan untuk kegiatan penanganan perubahan iklim. Terdapat beberapa potensi pendanaan baru yang saat ini sedang dalam tahap penajakan diantaranya potensi pendanaan proyek energi terbarukan dengan European Investment Bank (EIB), pendanaan *blue carbon* dari Pemerintah Australia dan potensi pembiayaan dengan menggunakan skema *blended finance*.

Rencana Kerja ICCTF Tahun 2019

Garis besar rencana kerja ICCTF tahun 2019 telah disepakati dalam *Strategic Meeting* yang dilaksanakan di Belitung pada Oktober 2018 lalu. Pada periode Januari – Maret tahun 2019, sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya kegiatan *Workshop Money Tools* dan SOP Program, *Workshop Monitoring* dan Evaluasi Tahunan (*Annual Review*) Program ICCTF Tahun 2018 – Kelompok Kerja I, Dukungan pada Peluncuran Laporan Pembangunan Kajian Rendah Karbon Indonesia, Dukungan pada Konsultasi Publik KLHS, dan Penyusunan *Project Identification Form* untuk GEF (Topik *sustainable cities* dan *biodiversity*).

Pada kuartal kedua, ICCTF akan melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu *Media* dan *Donor Visit* USAID ke Sumba Timur, Pertemuan Majelis Wali Amanat (MWA) I, Penutupan 5 proyek UKCCU serta kegiatan peningkatan kapasitas staf ICCTF. Pada kuartal ketiga, ICCTF berencana kembali menyelenggarakan ICCTF Day, serta *Media* dan *Donor Visit* sebagai salah satu upaya sosialisasi dan ekspose pembelajaran pelaksanaan proyek ICCTF di berbagai daerah. Berbagai kegiatan penggalangan dana (*fundraising*) akan dilakukan termasuk melalui submisi proposal baru ke donor potensial. Dalam rangka peningkatan kapasitas, pada periode ini juga direncanakan pelatihan *soft skill* untuk staf ICCTF. Pada kuartal keempat, ICCTF akan berpartisipasi dalam acara UNFCCC COP ke 25 serta penutupan proyek-proyek yang dibiayai hibah USAID dan UKCCU. Selain itu, pertemuan MWA kedua direncanakan pada kuartal ini.

Q1

JAN-MAR

- Kegiatan baru dengan pembiayaan UKCCU
- Penandatanganan *Grant Agreement* dengan WB dan ADB
- Pelaksanaan COREMAP
- Rapat MWA I – 2019
- *Media & Donor Visit* USAID ke Sumba Timur
- *Expo Project* di tingkat Provinsi
- Penyusunan *Project Identification Form* untuk GEF (Topik *Sustainable Cities* dan *Biodiversity*)
- Dukungan pada Peluncuran Kajian Pembangunan Rendah Karbon
- Dukungan pada Konsultasi Publik KLHS RPJMN

Q2

APR-JUN

- *Outcome Workshop* untuk penutupan proyek USAID dan UKCCU
- *Submit* proposal baru untuk mendapatkan pendanaan ke GEF
- Penutupan proyek UKCCU (5 proponen)
- Penutupan proyek USAID (6 proponen)
- Peningkatan kapasitas staf ICCTF

Q3

JUL-SEP

- ICCTF Day
- *Kick-off* Program baru ICCTF
- *Soft skill Training* untuk staf ICCTF
- *Media & Donor Visit* UKCCU
- *Fundraising* untuk donor potensial (bilateral/multilateral)
- *Submit* proposal baru - *Renewable Energy*

Q4

OKT-DES

- UNFCCC COP-25
- *Fundraising* untuk donor potensial (bilateral/multilateral)
- *Closing Program* PMU USAID & UKCCU
- ICCTF *Annual Report 2019*
- ICCTF *Annual Work Plan 2020*
- Rapat MWA II - 2019

Progres & Capaian

Kelompok Kerja 1

| Mitigasi & Adaptasi |

Workshop Monitoring dan Evaluasi Program ICCTF

Pada tanggal 25-26 Februari 2019, ICCTF menggelar kegiatan *Workshop Monitoring* dan Evaluasi tahunan yang diperuntukkan bagi proyek yang dilaksanakan oleh proponent selama kurun waktu 2018. Kegiatan *Workshop Monitoring* dan Evaluasi Tahunan ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek ICCTF yang dilakukan oleh proponent pada tahun 2018, baik bagi proyek yang telah selesai maupun yang masih berjalan untuk melihat capaian dan kemajuan dari sisi *output* program dan penyerapan keuangan.

Sepanjang tahun 2018, ICCTF mengelola 33 proyek dengan pendanaan USAID, termasuk 25 proyek yang berakhir pada bulan Juni 2018 dan 6 proyek dimulai pada bulan Juli 2018, sementara 2 proyek lainnya mulai berjalan pada bulan Januari 2019. Pada tahun yang sama, ICCTF juga mengelola 16 proyek dengan pendanaan UKCCU dalam kerangka program, "Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut untuk Mengurangi Emisi di Indonesia melalui Kegiatan Lokal (TEGAK). Dari 16 proyek tersebut, 11 proyek berakhir

pada bulan Juni 2018, sementara 5 proyek lainnya mulai dilaksanakan pada bulan Juli 2018.

Workshop Monitoring dan Evaluasi Tahunan ini menghadirkan Direktur Lingkungan Hidup Bappenas selaku Sekretaris MWA ICCTF, Medrilzam dan Deputi I BRG, Budi S. Wardhana. Dalam pembukaan *workshop*, Direktur Lingkungan Hidup Bappenas menekankan pentingnya evaluasi mendalam dari pekerjaan yang telah dilakukan bersama dengan mitra pelaksana, tidak hanya sekedar hasil fisik, namun yang utama adalah dampak sosial dan ekonomi dari pelaksanaan kegiatan. Kerjasama dan komunikasi dengan mitra pelaksana adalah kunci utama yang tetap harus dibina agar target-target yang ditentukan secara bersama dapat dicapai dengan optimal.

Disamping melihat capaian dan kemajuan proyek, pembahasan beberapa isu juga menjadi fokus pertemuan yang turut dihadiri oleh Kementerian/Lembaga terkait, diantaranya integrasi data dalam sistem PRIMIS yang



Proyek Pendanaan UKCCU

diinisiasi oleh BRG, keberhasilan kegiatan revitalisasi dalam program 3R, penyeragaman metode perhitungan emisi, serta praktik terbaik dalam merubah paradigma masyarakat di lokasi proyek. Baik ICCTF, perwakilan Kementerian/Lembaga dan proponent secara aktif terlibat diskusi dan saling memberikan masukan terhadap pelaksanaan program kedepan. Beberapa pihak, baik proponent maupun Kementerian/Lembaga menyampaikan ketertarikannya untuk mereplikasi dan mengembangkan kegiatan-kegiatan penanganan perubahan iklim yang telah dilaksanakan ICCTF bersama dengan mitra pelaksana.

Pada tahun 2019, ICCTF mengelola 5 proyek mitigasi berbasis lahan melalui pendanaan UKCCU dalam kerangka program “Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut untuk Mengurangi Emisi di Indonesia melalui Kegiatan Lokal (TEGAK)” yang dilaksanakan di 2 provinsi yakni Kalimantan Tengah dan Riau. Pelaksana proyek tersebut adalah Riau Woman Working Group (RWWG), Pusat Pengendalian Kebakaran dan Rehabilitasi Hutan (P2KLH) Universitas Palangka Raya, Perkumpulan Elang, Yayasan Mitra Insani, dan PPLH-PI Universitas Kristen Palangka Raya-Konphalindo. Selama Q1 2019, ICCTF telah melaksanakan kegiatan program *monitoring* ke beberapa lokasi proyek untuk memastikan pelaksanaan proyek Mitigasi Berbasis Lahan sesuai dengan rencana kerja dan mekanisme pengelolaan proyek serta pemeriksaan BMN untuk proyek yang telah selesai pada tahun 2018.

Tanggal	Proponen	Lokasi	Kegiatan
24 - 26 Jan 2019	P2KLH Universitas Palangkaraya	Ex PLG Blok A, Kapuas Kalteng	<i>Monitoring</i> Capaian Program
14 - 16 Feb 2019	P2KLH Universitas Palangkaraya	Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Barat	Pemeriksaan BMN
17 - 19 Feb 2019	Yayasan Mitra Insani	Kabupaten Siak, Riau	Pemeriksaan BMN
3 - 5 Mar 2019	WALHI Kalimantan Barat	Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat	Pemeriksaan BMN
7 - 9 Mar 2019	Sampan Kalimantan	Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat	Pemeriksaan BMN
11 - 13 Mar 2019	Yayasan Mitra Insani	Kabupaten Siak, Riau	<i>Spotcheck</i> Keuangan dan <i>Monev</i> Capaian Program
14 - 17 Mar 2019	P2KLH Universitas Palangkaraya	Ex PLG Blok A, Kapuas Kalteng	<i>Spotcheck</i> Keuangan dan <i>Monev</i> Capaian Program
27 - 30 Mar 2019	PPLH-PI UNKRIP	Ex PLG Blok E, Kapuas Kalteng	<i>Spotcheck</i> Keuangan dan <i>Monev</i> Capaian Program



Kemajuan dan Capaian Program Batch I ICCTF-UKCCU

ICCTF - Konsorsium Mitra Insani

Dokumen penurunan emisi dan sosial ekonomi masyarakat sedang dalam proses penyusunan dengan tim ahli serta Rencana Aksi Restorasi KHG Siak-Kampar dan SOP/EWS di Kampung Lalang dan Kampung Tanjung Kuras.

Disamping itu, telah dilakukan distribusi media kampanye serta diseminasi terkait kebakaran hutan dan lahan gambut di 5 desa (Kampung Lalang, Tanjung Kuras, Penyengat, Rawa Mekar Jaya dan Sungai Rawa). *Talkshow* diseminasi Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut juga telah dilaksanakan bersama dengan KPID dan Dinas Pendidikan Provinsi Riau terkait kesadaran dan sensitifitas anak didik (SMP/SMA) terhadap bahaya kebakaran dan dampaknya bagi kesehatan. Mitra pelaksana telah melakukan diskusi bersama kelompok pengelola radio Insani FM Kampung Rawa Mekar Jaya untuk meningkatkan intensitas kampanye dan diseminasi bahaya kebakaran hutan dan lahan.

Dalam mendukung kegiatan revitalisasi, demplot *agroforestry* telah dibangun dengan model Pertanian Tanpa Bakar (PLTB) di Kampung Lalang, Kampung Penyengat dan Desa Pulau Muda. Rumah bibit juga dibangun dan menjadi media belajar bersama. Penanaman bibit pohon hutan dan pengayaan tanaman dilakukan di Desa Teluk Lanus dan HD Segamai-Serapung.



ICCTF - Riau Woman Working Group (RWWG)

Riau Woman Working Group (RWWG) telah menyusun dokumen SID dan DED penimbunan kanal. *Spotcheck* BMN juga dilakukan di Kampung Kayu Ara dan Parit I/II yaitu sumur bor yang berjumlah 42 unit dan sekat kanal sebanyak 10 unit. Menara Pemantau Api juga telah dibangun di Kampung Parit I/II setinggi 13 meter.

Kelompok perempuan di Kampung Sungai Kayu Ara telah diberikan kegiatan pelatihan yang dihadiri 18 orang dan di Kampung Parit I/II yang dihadiri 19 orang. Pelatihan ini menghasilkan 3 jenis produk turunan dari bawang merah yaitu Kerupuk Bawang Merah, Bawang Merah Goreng dengan 2 varian rasa (Original dan pedas), *Cookies* bawang merah origano dan keju. Pada pelatihan ini juga sudah menghasilkan bentuk kemasan dan label produk sehingga nanti siap untuk dipasarkan. Upaya pemasaran produk inovasi gambut ini juga dipasarkan secara online melalui website <http://www.prigi.id/> serta media sosial lainnya seperti instagram dan facebook.

Sejumlah kemajuan dari pengembangan ekowisata *mangrove* di Sungai Kayu Ara yang bekerja sama dengan kelompok pengelola ekowisata diantaranya adalah pembangunan *track*/jalan untuk menyusuri hutan *mangrove* sepanjang ± 250 meter, 3 kamar mandi yang didesain ramah difabel, serta rumah pohon dan gazebo.

Pengayaan penanaman tanaman hutan juga dilakukan berdasarkan perencanaan jenis tanaman seperti meranti, mentangor, balam, pinang dan kopi. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Masyarakat Peduli Api dengan melakukan pembuatan tajur sebelum penanaman dilakukan dan pembuatan lobang tanam. Penanaman dilakukan di beberapa lahan yang merupakan lahan rawan kebakaran baik lahan yang dimiliki oleh desa maupun lahan pribadi masyarakat.



ICCTF – Konsorsium Perkumpulan Elang

Pada kuartal pertama, telah dilakukan sosialisasi mengenai Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut yang melibatkan MPA, Pemerintahan Desa dan Kelompok Perempuan yang berjumlah 41 orang telah dilaksanakan dengan baik.

Kegiatan revitalisasi di beberapa desa lokasi proyek diantaranya sebagai berikut:

- Kampung Dosan Komoditi cabe rawit yang dikembangkan di demplot *agroforestry* Kampung Dosan telah habis masa tanamnya, dan untuk kedepannya akan dilakukan pengembangan budidaya nenas di lahan tersebut, untuk kebutuhan bibit nenas di-support oleh dana swadaya Konsorsium Elang.
- Kampung Bunsur, MPA Kampung Bunsur yang mengembangkan demplot *agroforestry* mengganti komoditi cabe rawit dengan serai wangi dan aktifitas MPA dalam melakukan patroli dan sosialisasi pencegahan KARHUTLA terhadap masyarakat semakin meningkat.
- Kampung Kayu Ara Permai, demplot *agroforestry* mengalami pertumbuhan pada tanaman nenas yang ditanam sangat baik serta diperkirakan akan dapat dipanen pada Juli 2019 dan juga kesadaran masyarakat desa terus meningkat ditunjukkan dengan adanya jadwal patroli KARHUTLA di desa tersebut.
- Kampung Harapan, demplot *agroforestry* dengan tanaman cabe rawit dan kopi liberika sangat baik. Untuk tanaman cabe rawit kelompok wanita sudah memanen 5 kali dan berencana akan memperluas lahan kedepannya. Dan juga MPA kampung harapan diutus melakukan bantuan pemadaman api yang terjadi di Kampung Teluk Lanus selama 6 hari.
- Kampung Koto Ringin salah satu desa yang aktif dalam mengembangkan ide pemanfaatan hasil lahan. Kampung Koto Ringin telah melakukan pemanfaatan lahan gambut dengan peternakan sapi, kedepannya akan memanfaatkan kotoran sapi tidak hanya untuk pupuk kandang namun juga untuk biogas dengan alat sederhana yang dibantu oleh proponent dalam hal rancangan instalasi sederhananya. Selain itu terdapat agenda untuk pengembangan budidaya azolla dan cacing untuk mendukung keberlangsungan usaha peternakan sapi. Kampung Koto Ringin juga menyampaikan ketertarikannya dengan kegiatan pembibitan kayu alam setelah dilakukan diskusi dengan MPA Kampung Koto Ringin.



ICCTF - Pusat Pengendalian Kebakaran & Rehabilitasi Hutan (P2KLH)

Selama kuartal 1 2019 ini proponent fokus terhadap penyelesaian pengumpulan data untuk *baseline* ekonomi sosial serta *monitoring* evaluasi kegiatan yang telah berjalan di desa-desa yang menjadi binaan proponent. Kunjungan lapangan ke Pusat Pengendalian Kebakaran dan Rehabilitasi Hutan (P2KLH) juga meninjau Menara Pemantau Api di Desa Mantangai Hilir dan Mantangai Tengah yang dibangun setinggi 15 m.

Infrastruktur pembasahan lahan gambut juga telah terbangun sebanyak 33 unit sekat kanal dan 300 unit sumur bor. Pembuatan dokumen SID dan DED pembangunan sekat kanal, sumur bor, penimbunan kanal dan tower pemantau kebakaran akan diperbarui, sehingga proponent melakukan survei kembali untuk menyesuaikan. Proponent juga telah menyelesaikan penyusunan *baseline* pengurangan emisi, sosial dan ekonomi dari 7 desa intervensi proyek. Data diambil langsung menggunakan kuisioner yang ditujukan kepada masyarakat.

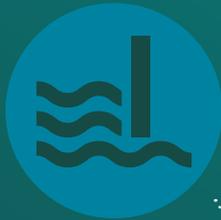


ICCTF – UNKRIP

Sampai dengan kuartal pertama, proponen telah menyelesaikan seluruh kegiatan fisik seperti pembangunan sumur bor dan sekat kanal. Adapun sejumlah kegiatan non fisik yang telah dilaksanakan diantaranya penyusunan dokumen SOP terkait pengelolaan lahan gambut serta dokumen EWS pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut yang berlaku untuk Desa Tumbang Mangkutup dan Katunjung, *Wokrshop* Pemantauan Kebakaran pada Lahan Gambut juga telah dilaksanakan yang melibatkan 50 orang dari tiap desa serta Lokakarya Pengembangan Kawasan Ekowisata Berbasis Masyarakat juga telah di berikan kepada Masyarakat Desa Tumbang Mangkutup yang diikuti oleh 27 orang. *Spotcheck* lokasi penanaman bibit juga dilakukan di 25 ha di Desa Katunjung dan 25 ha di Desa Tumbang Mangkutup dengan jenis bibit tanaman pantung/jelutung yang diusulkan oleh masyarakat karena memiliki nilai ekonomis.

Monitoring infrastuktur pembasahan gambut juga dilakukan setelah terbangunnya 30 unit sekat kanal yang dibangun di Desa Katunjung namun melibatkan masyarakat Desa Tumbang Mangkutup. Pembangunan sekat kanal dilakukan di Desa Katunjung oleh karena perbedaan KHG antara Desa Katunjung (KHG Kapuas-Barito) dengan Desa Tumbang Mangkutub (KHG Kapuas-Kahayan). Adapun untuk 60 unit sumur bor tetap dapat dibangun dan dibagi di 2 desa karena beberapa lahan yang digunakan adalah lahan pribadi masyarakat.





119

Sekat Kanal



384

Sumur Bor

ICCTF-UKCCU dalam Angka



4

Tower
Pemantau Api



66.770

Bibit Ditanam

Proyek Pendanaan USAID

Diskusi dengan Kementerian/Lembaga

Dampak proyek terutama dampak positif sesungguhnya menarik untuk disampaikan kepada pihak lain terutama K/L. Guna memberikan waktu yang cukup untuk berdiskusi mengenai dampak *pilot* proyek, maka presentasi dan diskusi dampak proyek dilakukan dengan masing-masing lembaga sasaran.

Keasdepan Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor RiiL, Kemenko Perekonomian mengundang ICCTF untuk mempresentasikan *pilot* proyek di Kantor Kemenko (31 Januari 2019). Bapak Asdep mempertimbangkan memilih 5 proyek untuk menjadi dasar intervensi lembaganya, jika memungkinkan akan dicarikan CSR untuk tujuan replikasi dan memperbesar skala intervensi. Proyek yang dipilih adalah: Javlec-Gunungkidul, CFES-Bogor, Terangi-Belitung, Yayorin-Kobar, FKt UGM-Blora-Ngawi. ICCTF melakukan presentasi dan diskusi ke lembaga lainnya.



Monev Program & Spotcheck Keuangan

1. *Workshop* Ketahanan Pangan Kabupaten Gunungkidul (10 Januari 2019). Hasilnya disepakati membuat *pilot* proyek penyusunan dokumen ketahanan pangan level desa di 6 desa yang mempunyai RTRWDes.
2. *Monev* program dan keuangan Yayorin tanggal 10-12 Maret 2019. Melakukan diskusi dan pemeriksaan dokumen di kantor Yayorin. *Output* proyek sebagian besar sudah dilakukan. PLTB sudah menjadi program Kabupaten Kobar dengan dilakukannya penen raya padi PLTB oleh Ibu Bupati. Hortikultura sudah memberikan dampak ekonomi yang baik. *Monev* keuangan hasilnya Yayorin memperoleh nilai 75 berarti *ranking Moderate*.
3. *Monev* program dan *spotcheck* keuangan LOH tanggal 14-16 Maret 2019. Melakukan diskusi dan pemeriksaan dokumen di kantor LOH. *Output* proyek sebagian besar sudah terlaksana. *Monev* keuangan hasilnya LOH memperoleh nilai 75 berarti *ranking Moderate*.



Kemajuan dan Capaian Program Batch III ICCTF-USAID

ICCTF - Yakkum Emergency Unit (YEU)

- Pendampingan pada 24 Kelompok Tani yang tergabung dalam Gapoktan Kecamatan Panggang dan Gapoktan Kecamatan Purwosari.
- *Workshop* Ketahanan Pangan Kabupaten Gunungkidul, dilanjutkan Penyusunan Perencanaan Ketahanan Pangan 6 desa di Kabupaten Gunungkidul.
- Penyusunan laporan final FS PAMDes Desa Tepus (Dusun Tegalweru, Tosari 1, Gambuk dan Tosari 2). Debit sumber air Cluwakan 3,6 ton/jam.
- Koordinasi dan melakukan *expose* proyek untuk menjamin keberlanjutan program.
- Penyusunan laporan akhir dan pembuatan laporan pembelajaran proyek.
- Penyusunan dokumentasi.



ICCTF - FTP UGM

- Pelatihan budidaya padi metode SRI di Mauliru. Pelaksanaan replikasi budidaya padi metode SRI di Mauliru, Kecamatan Kambera, Sumba Timur sudah didampingi BPP Lambanapu. Pendampingan Penyuluh Pertanian ini sangat penting untuk mencapai keberhasilan dan keberlanjutan.
- Pertumbuhan padi lebih baik dibandingkan Masa Tanam (MT) sebelumnya yang belum didampingi penyuluh secara efektif.
- Alih teknologi penggunaan dan *monitoring* Telemetri tanah dan udara dilakukan FTP-UGM dan IPB kepada Penyuluh Pertanian BPP Lambanapu.
- Kerjasama yang lebih baik dibangun antara UKAW Kupang dengan BPP Lambanapu dan Dinas Pertanian Sumba Timur dalam pengembangan budidaya padi SRI.
- Kondisi padi ada serangan tongro dengan intensitas ringan sampai sedang namun dapat dikendalikan.



ICCTF – Lembaga Olah Hidup (LOH)

- Rehabilitasi hutan pantai mencapai 450 ha di 3 desa. Program LOH ini menginspirasi kegiatan rehabilitasi lahan melalui penanaman pohon yang dilakukan di 7 kecamatan lainnya. Mereka menanam bibit durian, asam manis, beringin, kayu dingin, mahoni, kelengkeng, dll.
- Ada Komunitas Pohon Sumbawa (KOMPAS) yang setiap minggu minta bibit dan menanam pohon di lahan kritis. Pihak lainnya yang terlibat bantuan bibit dan penanaman adalah Dinas Pertanian, swasta, BKPH, Camat Lape, Kepala Desa Lab. Kuris, Mapala Universitas Sumbawa (UNSA), Racana UNSA, dan mahasiswa praktek dari UNTB.
- Rehabilitasi tambak sudah dimanfaatkan untuk memelihara bandeng yang sudah berumur 2 bulan.
- Rehabilitasi *mangrove* seluas 75 ha sudah tumbuh baik dengan terus melakukan penyulaman. Metode baru mulai dikembangkan yaitu menggunakan ruas bambu betung untuk penguat bibit dari hempasan ombak.
- Budidaya pertanian terutama hortikultura dan tanaman pangan sudah menghasilkan nilai ekonomi.
- Kelompok sudah didampingi oleh LOH, termasuk pengembangan bibit, pengembangan pupuk dan herbisida organik.
- Tambahan bantuan 50 paket *setup* lebah madu *Trigona* sp. dari KPH Ampang Plampang untuk kelompok HKM Ai Manis, Tanjung Bele.



ICCTF – Perkumpulan Sesami

- Proyek sudah selesai, ditutup dengan kegiatan *expose* hasil proyek, dan menanam pohon bersama. Kegiatan dipusatkan di Desa Mriyan, Boyolali.
- Bantuan tambahan bibit tanaman kayu dan tanaman buah didapatkan dari BPDAS SOP Yogyakarta dan BPTH Jawa Tengah sebanyak 4.720 batang sehingga total

- penanaman selama proyek 18.095 batang terdiri dari tanaman kopi, tanaman keras dan tanaman buah-buahan.
- Penyusunan laporan akhir dan pembuatan laporan pembelajaran proyek.
- Penyusunan dokumentasi.

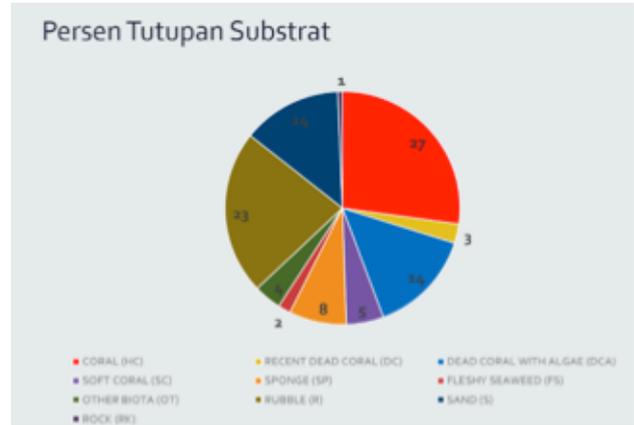


ICCTF - Yayasan Terangi

- Penyelesaian penilaian kelentingan terumbu karang di perairan Pulau Lembeh.
- Pengambilan data wisata yang meliputi jenis kegiatan yang dilakukan, kualitas sarana wisata yang tersedia.
- Analisa gangguan karang, ditemukan dari survei terutama oleh sponge dan cacing pipih
- Kegiatan peningkatan kapasitas para pihak di Pulau Lembeh. Kegiatan yang pertama adalah Lokakarya Sekolah Pantai Indonesia. Kegiatan ini melibatkan 28 orang yang terdiri dari 13 lembaga (SMA Negeri 3 Bitung, SMK Negeri 3 Bitung, SMA LPM Motto, SMP Negeri 4 Bitung, SMP Negeri 9 Bitung, SMP Negeri 15 Bitung, SMP PGRI Kareko Bitung, Kelompok Pengelola Sumber Daya Pesisir Pasir Panjang, Kelompok Pengelola Sumber Daya Pesisir Kareko, Komunitas Sea Soldier Sulawesi Utara, PT Etmieco, UPT Loka Konservasi Biota Laut Bitung-LIPI, dan Sekolah Lingkungan Kota Bitung.



- Kegiatan kedua adalah *workshop* Wisata Selam dengan melibatkan sebanyak 11 orang yang terdiri dari 4 lembaga (Kelompok Pengelola Sumber Daya Pesisir, Komunitas Selat Lembeh Bersih, POSSI KOTA BITUNG, Komunitas Sea Soldier Sulawesi Utara.



ICCTF – Universitas Tanjungpura

- Pembangunan konstruksi dan instalasi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) pengolah air gambut menjadi air minum di 2 desa.
- Pelatihan dan praktek budidaya kaliandra.
- Sosialisasi Program, Pengelolaan Air bersih dan perlindungan KHDTK Untan di Aula Pertemuan Kantor Desa Peniti Dalam I Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah.



- Pelatihan budidaya klulut dengan peserta dari 11 desa, dan pengadaan demplot budidaya lebah madu klulut.
- Persiapan pembangunan sumur bor sebanyak 11 lokasi.
- Perakitan alat dan distribusi 6 unit alat pemadam api Nyapar.
- *Monev* program.



ICCTF – Yayorin

- Penanaman pohon dilakukan di lahan 200 ha. Pertumbuhan tanaman baik.
- Bantuan sapi sudah diterima kelompok dan tumbuh baik di hutan Lamandau.
- PLTB disebarluaskan baik oleh OPD ke seluruh Kobar, Yayorin maupun petani menyebarkan PLTB di Kecamatan Arut Selatan.
- Bupati memberikan pernyataan siap memberikan dukungan pengembangan Pertanian dengan Pola Pengolahan Lahan Tanpa Bakar yang disampaikan dalam sambutan syukuran panen padi PLTB Tanjung Putri 31 Januari 2019 di lahan PLTB Tanjung Putri.
- Demplot budidaya mina padi dipagar dengan waring untuk melindungi ikan dari gangguan berang-berang dan banjir dari sungai.



ICCTF – Tiara Pusaka

- Sosialisasi kepada *stakeholder* Kecamatan Saparua dan Kecamatan Saparua Timur.
- *Monitoring* dan konsolidasi kelompok lama, *monitoring* usaha dan persiapan lahan tanam.
- Sosialisasi ke *stakeholder* Provinsi Maluku: Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Dinas Koperasi UMKM Provinsi Maluku, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Balai Proteksi Tanaman dan Peternakan Provinsi Maluku, Sekolah Pertanian Pembangunan Provinsi Maluku, dan Jaringan Ahli Perubahan Iklim Region Maluku – Unpatti.
- Konsolidasi dilakukan terhadap kelompok-kelompok tani: Efrata dan Tiberiassi Desa Ouw, Ceria di Desa Sirisori Islam, Sejahtera di Desa Sirisori Kristen, Lolaloni dan Sakal di Dusun Pia, serta Flamboyon dan Laino Manise di Desa Haria. Sedangkan kegiatan sosialisasi program lanjutan dilakukan kepada para petani di Ihamahu, Mahu, dan Haria.
- Film dokumenter dimulai dengan mengumpulkan dan membuat dokumentasi film pada setiap kegiatan.
- *Workshop* pertanian organik diikuti 70 orang peserta yang berasal dari 7 kelompok tani.
- Praktek pembuatan pupuk dan pestisida organik di kelompok tani.
- Pertemuan dan konsolidasi jaringan petani organik, dan pembentukan calon koperasi. Kondisi musim panas. Yang punya air Yamahu, Desa Mahu, Aria Gunung.



Kelompok Kerja 2

| Energi |

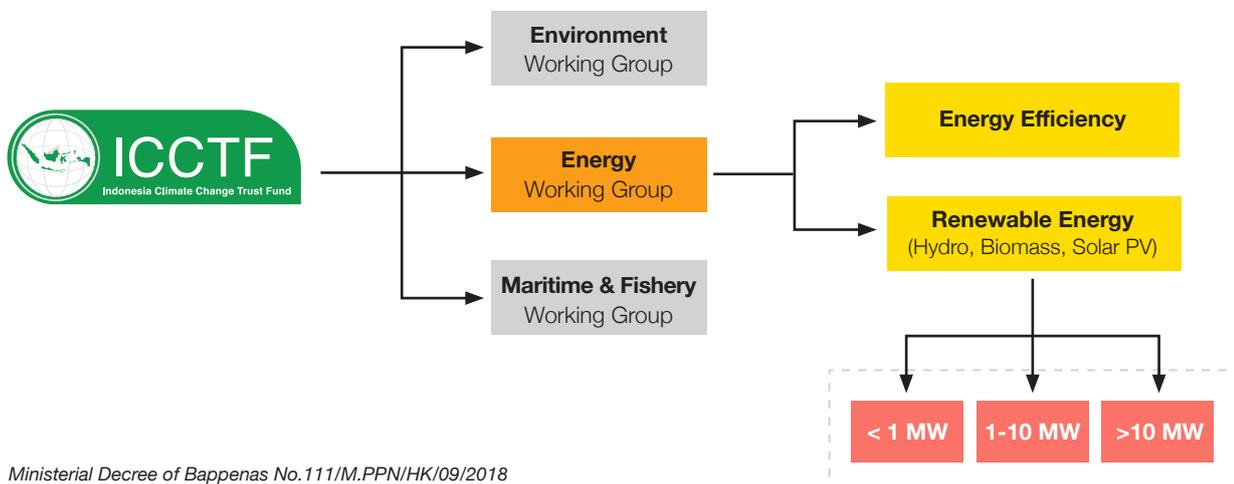
Gambaran Umum Kelompok Kerja Energi ICCTF

Kelompok Kerja (Pokja) Energi Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) dibentuk pada tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) dan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kepmen PPN/Bappenas) Nomor 111 Tahun 2018 tentang Pembentukan Majelis Wali Amanat (MWA) Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/Indonesia Climate Change Trust Fund. Pokja Energi ICCTF dibentuk sebagai salah satu strategi Pemerintah dalam hal ini Kementerian PPN/Bappenas untuk

mencapai tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Nomor 7, serta mewujudkan komitmen Pemerintah Indonesia dalam penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) khususnya di sektor energi. Fungsi pokok Pokja Energi ICCTF antara lain:

- Memberikan dukungan dan fasilitasi kepada para pengembang untuk mengakses dukungan pendanaan murah untuk pembangunan infrastruktur energi terbarukan;
- Menyiapkan proyek-proyek infrastruktur energi terbarukan yang layak untuk mendapatkan pendanaan murah (*bankable project*);
- Melakukan *study/kajian* mendalam yang berkaitan dengan pemetaan serta peluang pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi di Indonesia;
- Mendorong peran badan usaha, swasta, lembaga internasional dan juga filantropi untuk terlibat dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia;

Pokja Energi ICCTF untuk Mengakselerasi Pengembangan Energi Terbarukan

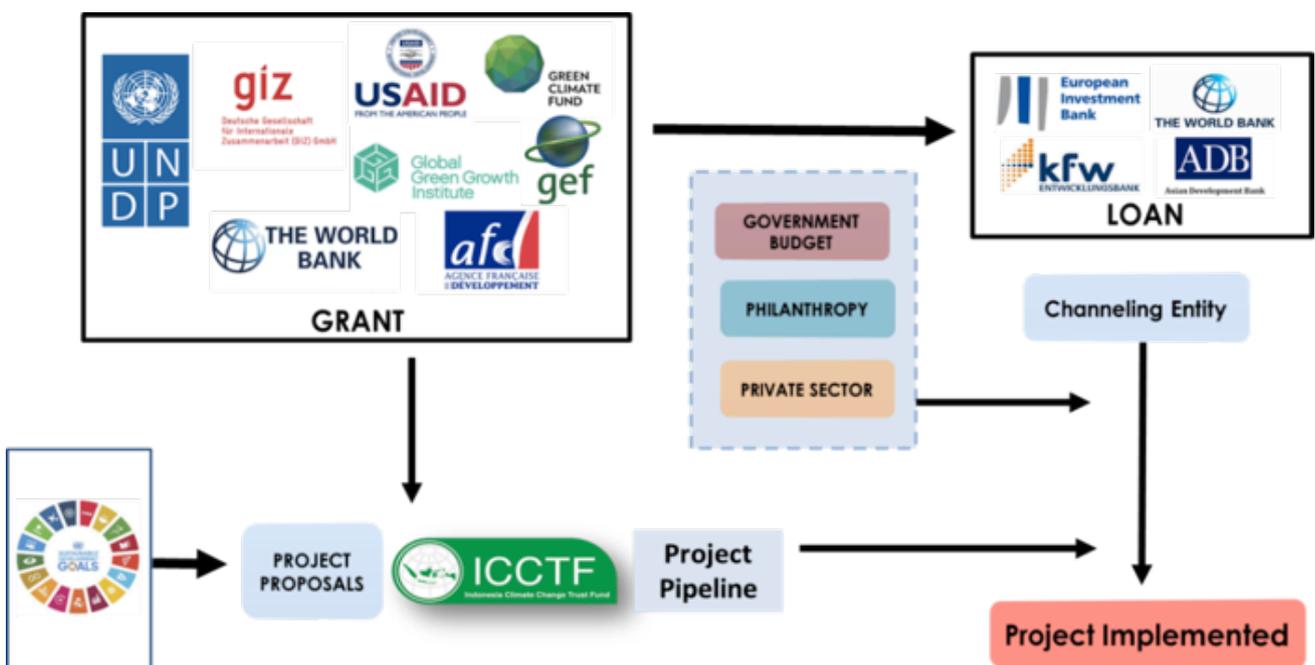


Mekanisme *Blended Finance* Proyek Energi Terbarukan

Untuk mendorong pendanaan pembangunan energi terbarukan di Indonesia, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas telah mengembangkan mekanisme *blended finance*. *Blended finance* adalah salah satu mekanisme pembiayaan yang melibatkan pihak swasta dan industri jasa keuangan untuk mendukung proyek-proyek

infrastruktur dengan memadukan unsur keberlanjutan. Ide dasar dalam mekanisme *blended finance* adalah menciptakan skema pendanaan yang menarik bagi sektor swasta dengan melibatkan pendanaan pemerintah dan lembaga internasional maupun filantropi yang bersifat *soft loan*, *grant* maupun *guarantee mechanism*.

Mekanisme *Blended Finance* melalui Kelompok Kerja Energi ICCTF



Kegiatan Periode Januari-Maret 2019

Selama periode Januari-Maret, Pokja Energi ICCTF telah melakukan beberapa kegiatan terutama berhubungan dengan fasilitasi pendanaan murah untuk pembangunan proyek energi terbarukan. Kegiatan tersebut antara lain:

Penyusunan Buku *List of Renewable Energy Project*

Pokja Energi ICCTF bekerja sama dengan USAID-ICED II telah menyusun buku *List of Renewable Energy Projects* (RE-Pro). Buku tersebut memuat proyek-proyek yang sudah layak mendapat manfaat pendanaan murah. Buku tersebut juga telah di-*launching* oleh Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas pada acara COP24 di Katowice akhir tahun 2018 yang lalu.

Buku *List of Renewable Energy Projects* (RE-Pro) memuat sebanyak 29 proyek energi terbarukan (hidro, surya, bioenergi). Pokja Energi ICCTF selanjutnya akan melakukan *updating* proyek-proyek yang ada di dalam buku tersebut dan akan menjadi basis dalam penawaran *pipeline project* kepada para donor.

Koordinasi dengan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM

Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan selaku Koordinator Pokja Energi ICCTF telah melakukan pertemuan dengan Kementerian ESDM untuk mensosialisasikan Pokja Energi ICCTF dan penyamaan persepsi mengenai strategi pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Hasil dari pertemuan tersebut adalah:

1. Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Kementerian ESDM) bertanggung

jawab mengkoordinasikan *project pipeline* yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah.

2. Pokja Energi ICCTF bertanggung jawab mengkoordinasikan *project pipeline* yang diusulkan oleh badan usaha dan juga mitra pembangunan (pinjaman dan hibah).
3. Kementerian ESDM dan Pokja Energi ICCTF akan membentuk Tim Bersama yang bertugas menseleksi proposal-proposal proyek energi terbarukan.

Penjajakan Kerja Sama dengan European Investment Bank (EIB)

Menindaklanjuti *Letter of Intent* (LoI) antara Pemerintah Indonesia dan EIB yang telah ditandatangani oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas pada Oktober 2018, Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan sebagai Koordinator Pokja Energi ICCTF telah melakukan pertemuan langsung dengan delegasi EIB. Pertemuan dengan delegasi EIB dilakukan pada bulan Februari 2019 bertempat di Kantor ICCTF, Menara LIPPO Kuningan Lantai 15. Hasil pertemuan dengan delegasi EIB antara lain:

1. EIB menawarkan *soft loan* untuk membiayai proyek energi terbarukan (ET) di Indonesia dengan indikasi mencapai

100 Juta Euro. Pinjaman tersebut akan disalurkan melalui skema *framework loan* dimana pembiayaan akan disalurkan untuk mendanai proyek energi terbarukan secara *grouping*, bukan *project by project*. *Framework loan* akan diimplementasikan melalui *channeling entity* atau *two step loan*. Dalam hal ini, EIB mensyaratkan *channeling entity* harus merupakan badan usaha atau lembaga keuangan milik negara.

2. Pokja Energi bertanggung jawab mencari dan menentukan badan usaha atau lembaga keuangan yang cocok dan bersedia menjadi *channeling entity* tersebut.

3. Pokja Energi ICCTF telah melakukan peninjauan kepada beberapa lembaga yang potensial untuk menjadi *channeling entity*. Akan tetapi sebagian besar dari lembaga-lembaga tersebut keberatan dengan skema *framework loan* karena sangat dipengaruhi oleh kesiapan proyek energi terbarukan yang masuk dalam *framework loan* tersebut.
4. Pokja Energi ICCTF dan pihak EIB sedang mengupayakan beberapa alternatif kerja sama sebagai tindak lanjut pendanaan energi terbarukan di Indonesia. Alternatif tersebut antara lain:
 - a. Mekanisme tidak langsung dengan pinjaman melalui pemerintah atau yang dinamakan dengan *Subsidiary Loan Agreement (SLA)*, dimana mekanisme SLA dapat dijalankan apabila fasilitas pinjaman tersebut dapat dimasukkan pada *Bluebook SLA*. Untuk itu perlu adanya pembahasan lebih lanjut terkait institusi peminjamnya. Usulan dari SMI dilakukan sama seperti dana WB untuk pemboran panas bumi swasta;
 - b. EIB telah setuju untuk *refinancing*, untuk itu dibuat mekanisme *Direct Lending* kepada BUMN/perbankan nasional tanpa jaminan pemerintah untuk membiayai proyek EBT yang telah selesai tahap konstruksi (*refinancing*). Bekerjasama dengan PINA untuk memanfaatkan instrumen perbankan pemerintah.
 - c. Saat ini dilakukan peninjauan (*beauty contest*) untuk perbankan pemerintah dengan skema baru EIB yang tidak memerlukan jaminan pemerintah untuk mendapatkan institusi perbankan yang paling siap dan memberi manfaat maksimal.



Rapat Pertemuan dengan Delegasi EIB

Peninjauan *Channeling Entity* dengan Badan Usaha/Lembaga Keuangan

Menindaklanjuti rencana kerja sama dengan EIB, Pokja Energi ICCTF telah melakukan koordinasi dan peninjauan *channeling entity* dengan beberapa Badan Usaha Milik Negara dan Lembaga Keuangan. Adapun lembaga-lembaga yang sudah diinjeksi antara lain:

1. PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI)

PT. SMI belum bersedia menjadi *channeling entity* dikarenakan lingkup usaha PT. SMI tidak sesuai dengan proyek energi terbarukan yang cenderung skala kecil dan tersebar. Hal ini dinilai menyebabkan IRR dari proyek energi terbarukan kurang dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh PT. SMI. Selain itu *underlying* proyek yang masih memerlukan *assessment* lebih lanjut merupakan keterbatasan PT. SMI karena sangat berkaitan dengan risiko pinjaman.

2. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

LPEI tidak bersedia menjadi *channeling entity* karena berbenturan dengan regulasi yang mengharuskan adanya keterkaitan antara proyek yang akan dibangun untuk menunjang kegiatan ekspor di Indonesia. Sementara pada proyek-proyek energi terbarukan justru kondisi sebaliknya dimana lebih banyak impor peralatan yang akan digunakan. EIB sangat mengharapkan LPEI untuk dapat digunakan sebagai *channeling* karena pengalaman dengan Exim Bank China.

3. PT. Bahana

Kendala yang dihadapi PT Bahana adalah terbatasnya besaran aset yang harus dimiliki oleh PT. Bahana untuk melakukan pendanaan dalam jangka panjang (20 thn). Untuk saat ini, PT. Bahana hanya mampu untuk melakukan pendanaan sampai dengan 10 tahun. Kendala lainnya adalah persyaratan dari EIB yang meminta surat jaminan dari Pemerintah.

4. PINA Center

PINA tidak dapat menjadi *channeling entity* dikarenakan tidak masuk dalam kriteria EIB yaitu non-perusahaan pembiayaan pemerintah. PINA mengusulkan untuk melakukan pembiayaan melalui Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT). Akan tetapi EIB tidak menyetujui usulan tersebut karena EIB tidak dapat menyalurkan pinjaman melalui mekanisme *private fund*. EIB memandang perlu adanya *guarantor* yang kuat untuk pinjaman yang diberikan.

5. Bank BRI

Portofolio Bank BRI di bidang energi baru dan terbarukan masih terbatas pada pembangkit dengan kapasitas di atas 10 MW terutama PLTA dan PLTP (konsorsium dengan LJK lainnya). Sejak diterbitkannya Permen ESDM Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, Bank BRI belum melakukan pembiayaan proyek pembangkit EBT

karena tidak menemukan proyek baru yang *bankable*.

Sementara itu, pihak BRI berpendapat suku bunga yang ditawarkan EIB tidak lebih menarik dari pada suku bunga *club loan* yang selama ini dimanfaatkan BRI. Kelebihan EIB adalah pada masa jatuh tempo yang lebih panjang.

6. Bank BNI

Pertemuan dilakukan dengan BNI Sekuritas dan juga Bank BNI. Adapun BNI Sekuritas memandang *framework loan* dengan jumlah besar sekaligus akan memberatkan karena proyek yang akan didanai tidak dapat dimulai dan selesai secara bersamaan yang menyebabkan pihak BNI Sekuritas kesulitan mengatur *disbursement* dan manajemen proyeknya. BNI Sekuritas menyarankan kepada EIB untuk melakukan *refinancing* terhadap proyek-proyek energi terbarukan yang akan dibangun oleh IPP melalui BNI Sekuritas. Dengan mengambil pola *refinancing*, maka EIB dan BNI Sekuritas akan dapat lebih leluasa melakukan perundingan terhadap *framework loan*.

Sementara itu, Bank BNI mendukung pengembangan energi terbarukan dengan skema *grouping holding*. Sebagai tindak lanjut, Bank BNI membutuhkan daftar sponsor pada masing-masing proyek energi terbarukan sebagai bagian dari kriteria *acceptable project*. Sebagai tindak lanjut, Pokja Energi ICCTF sedang menjadwalkan *video conference* antara pihak EIB dengan Bank BNI.

Fasilitasi Dukungan *Technical Assistance* Studi Kelayakan PLTSa di Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah

Pokja Energi ICCTF menerima surat permohonan *Technical Assistance* untuk merevisi dan memperkuat studi kelayakan PLTSa di Luwuk, Banggai, Sulawesi Selatan dari Sekretariat PINA Center. Menindaklanjuti surat tersebut, berikut tanggapan dari Pokja Energi ICCTF:

1. Pada prinsipnya, Pokja Energi ICCTF mendukung inisiatif fasilitasi dan pendampingan penyiapan proyek energi terbarukan di Indonesia yang dilakukan Bappenas melalui PINA Center;
2. Terkait dengan permohonan dukungan TA untuk PLTSa Luwuk sebagaimana disampaikan dalam surat, Pokja Energi ICCTF telah melakukan koordinasi dengan salah satu mitra pembangunan yaitu GGGI untuk memastikan ketersediaan sumber daya dan kegiatan.
3. GGGI telah menyepakati bahwa permohonan tersebut dapat disetujui dan kegiatan penguatan kualitas studi kelayakan PLTSa Luwuk tersebut akan menjadi bagian dari *Green Growth Program Phase 2* sebagai dukungan terhadap Pokja Energi ICCTF.

Fasilitasi Rencana Pembangunan PLT Surya oleh Shizen Energy Jepang

Shizen Energy Inc, dari Jepang merupakan salah satu pengembang yang tertarik dengan proyek-proyek yang terdapat dalam *List of Renewable Energy Projects (RE-Pro)* yang dikeluarkan oleh Pokja Energi ICCTF. Pada bulan Februari yang lalu, perwakilan dari Shizen Energy telah berkunjung dan bertemu dengan Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan (SDEMP) selaku Koordinator Pokja Energi ICCTF. Adapun hasil pertemuan tersebut antara lain:

1. Shizen Energy tertarik untuk berinvestasi pada proyek PLT Surya (PV) di 2 lokasi, yaitu di Kabupaten Malinau (Kalimantan Utara), dan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Jambi). Adapun kedua proyek tersebut merupakan proyek yang diinisiasi oleh pengembang melalui pendanaan Hibah MCC.

2. Pokja Energi ICCTF menyambut baik inisiatif dari Shizen Energy untuk mendanai proyek PLTS di 2 (dua) lokasi tersebut. Pokja Energi ICCTF akan bertanggung jawab untuk memfasilitasi rencana kerja sama tersebut dengan berkoordinasi dengan Sekretariat Pengelola Hibah MCC dan *project developer*;
3. Pokja Energi ICCTF sudah bertemu dan berkoordinasi dengan Sekretariat Hibah MCC dan juga *project developer* kedua proyek tersebut. Direncanakan pada awal bulan April mendatang Pokja Energi ICCTF akan memfasilitasi pertemuan antara Sekretariat MCC, *project developer*, dan juga delegasi Shizen Energy.

Fasilitasi Rencana Dukungan Penyusunan Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) PLT Sampah di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur

Direktur SDEMP selaku koordinator Pokja Energi ICCTF telah menerima perwakilan dari Clean Power Indonesia untuk berdiskusi mengenai dukungan fasilitasi penyusunan studi kelayakan (*feasibility study*) PLT Sampah di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur. Berikut hasil pertemuan antara Pokja Energi ICCTF dengan perwakilan Clean Power Indonesia pada bulan Maret yang lalu;

1. Perwakilan menyampaikan usulan pembangunan PLTSa di 3 (tiga) lokasi, yaitu Kawasan ITDC Nusa Dua, Kabupaten Bangli, serta Kota Kupang. Pengembangan PLTSa di Kawasan ITDC Nusa Dua diinisiasi oleh pihak pengelola ITDC dengan memanfaatkan sampah sebesar 10 ton per hari yang bersumber dari hotel-hotel di kawasan ITDC. Listrik yang dihasilkan akan digunakan oleh ITDC sendiri untuk keperluan pompa dan penerangan jalan di kawasan ITDC. Pengembangan PLTSa di Kabupaten Bangli diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli. Adapun pasokan sampah dihasilkan dari pasar-pasar di sekitar Kabupaten Bangli yang diperkirakan mencapai 10 ton per hari. Selanjutnya, listrik yang dihasilkan akan digunakan sendiri untuk keperluan penerangan disekitar pasar. Pengembangan PLTSa di Provinsi NTB diusulkan oleh Pemprov Nusa Tenggara Timur dan belum dapat didetilkkan mengenai lokasi, potensi sampah dan juga rencana pemanfaatan.
2. Rencana pembangunan PLTSa di 3 (tiga) lokasi tersebut akan dikembangkan melalui skema *build, operate, transfer* (BOT) dengan PP Energi. PP Energi telah menyatakan komitmen penuh untuk mengembangkan ketiga PLTSa dengan skema BOT sampai dengan 10 tahun ke depan. Jika kontrak telah selesai, pengelolaan PLTSa ITDC akan diserahkan kepada Pengembang ITDC dengan PP Energi, PLTSa Bangli akan diserahkan kepada BUMD Kabupaten Bangli, sementara PLTSa Kupang akan diserahkan kepada BUMD Provinsi.
3. Terkait dengan rencana pembangunan ketiga PLTSa tersebut, pihak pengembang meminta dukungan dari Kementerian PPN/Bappenas yaitu melalui Pokja Energi untuk mencari sumber pendanaan untuk mendanai penyusunan studi kelayakan (*feasibility study*) ketiga proyek PLTSa tersebut. Adapun FS diharapkan dapat mengkaji mengenai ketersediaan pasokan sampah, potensi calon pengguna listrik, serta kebutuhan jaringan distribusi.
4. Bapak Nizhar Marizi dari Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan bahwa saat ini telah dibentuk Pokja Energi ICCTF yang bertugas mencari dan memfasilitasi pendanaan untuk pengembangan proyek energi terbarukan. Pokja Energi ICCTF telah berkerja sama dengan beberapa organisasi internasional untuk mendanai proyek-proyek energi terbarukan di Indonesia, salah satunya GGGI. Pokja Energi ICCTF telah berkoordinasi dengan GGGI mengenai peluang dukungan pendanaan untuk mendanai penyusunan studi kelayakan (*feasibility study*) ketiga proyek PLTSa tersebut pendanaan untuk mendanai penyusunan studi kelayakan (*feasibility study*) ketiga proyek PLTSa tersebut.
5. Perwakilan GGGI menyampaikan bahwa terkait dengan rencana dukungan terhadap penyusunan studi kelayakan (*feasibility study*) PLTSa di 3 (tiga) lokasi tersebut, GGGI akan mencoba melihat kembali ketersediaan alokasi anggaran yang masuk dalam *platform* kerja sama antara GGGI dengan Bappenas khususnya kerja sama sektor energi. Perwakilan GGGI juga menyampaikan bahwa selain *platform* kerja sama dengan Bappenas, GGGI juga menjalin kerja sama dengan PT SMI dalam *platform* "SDGs One" yaitu untuk membantu menyiapkan proyek-proyek energi terbarukan yang *bankable*. Oleh karena itu, *platform* kerja sama dengan PT SMI juga berpeluang dijadikan salah satu alternatif untuk mendanai studi kelayakan (*feasibility study*) PLTSa tersebut.



Foto Pertemuan dengan perwakilan dari Clean Power Indonesia

Inisiasi Pembentukan *Clean Green Fund*

Pembentukan *Clean Green Fund* (CGF) adalah satu rekomendasi tindak lanjut pelaksanaan MCC di Indonesia. CGF merupakan *project development and preparation facility* (PDF) untuk mendukung pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Diskusi pembahasan pembentukan telah dilakukan bersama Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral Kementerian PPN/Bappenas dan ex-konsultan

MCC. Pembentukan dan kapitalisasi CGF diusulkan untuk mendapatkan fasilitas hibah dari *Public-Private Infrastructure Advisory Facility* (PPIAF) Bank Dunia. Adapun usulan dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pembentukan CGF ini telah disampaikan Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam kepada Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

Realisasi Anggaran Pokja 2 Triwulan I TA 2019

Sampai dengan Maret 2019, capaian realisasi anggaran Pokja Energi ICCTF TA 2019 mencapai

6,14%



Adapun capaian tersebut didominasi oleh Belanja Modal Lainnya

76%

Beberapa kegiatan utama Pokja Energi ICCTF seperti Belanja Jasa Konsultan dan Belanja Jasa Lainnya belum berjalan dan sesuai rencana akan dimulai di Triwulan II.

Kelompok Kerja 3

| Kelautan |

Progres dan Capaian Program COREMAP-CTI

Coral Reef Rehabilitation and Management Program – Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) merupakan fase ketiga dari program Coremap yang diresmikan pada tahun 2014 dengan sumber dana berasal dari ADB dan World Bank. Pada tahun 2017, sebagai respon dari berhentinya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selaku *Executing Agency*, disepakati bahwa untuk komponen hibah GEF

baik melalui ADB maupun World Bank akan dialihkan kepada Kementerian PPN/Bappenas melalui Satker ICCTF. Semenjak itu, dilakukan perencanaan restrukturisasi untuk mengakomodasi peralihan *Executing Agency* tersebut. Sejak April 2018, perencanaan restrukturisasi program telah melalui koordinasi intens antara ICCTF, World Bank, ADB, LIPI dan KKP.

Hibah GEF World Bank

Hibah GEF ADB



Tujuan Proyek



Penguatan kapasitas kelembagaan dalam *monitoring* ekosistem pesisir dan penelitian untuk menghasilkan data berbasis informasi pengelolaan sumber daya, dan meningkatkan efektifitas pengelolaan ekosistem pesisir yang prioritas

Pengelolaan ekosistem terumbu karang yang berkelanjutan di Indonesia melalui peningkatan kapasitas untuk mengelola ekosistem terumbu karang di daerah target kawasan konservasi (MPA)



Durasi Proyek



2019 - Juni 2022

2019 - Desember 2022



Lokasi Proyek



- Raja Ampat, Prov. Papua Barat
- Laut Sawu, Prov. NTT

- Gili Matra, Prov. NTB
- Gili Balu, Prov. NTB
- Nusa Penida, Prov. Bali

Hibah GEF World Bank

Steering Committee Meeting COREMAP-CTI

(22 Januari 2019)

Pada bulan Januari tahun 2019, usulan restrukturisasi khususnya untuk program COREMAP-CTI yang didanai oleh hibah GEF World Bank telah menerima *endorsement* dari CEO/Chairperson GEF, berdasarkan penilaian bahwa program sudah selaras dengan GEF *focal strategies* dan sejalan dengan kebijakan dan prosedur GEF. Menindaklanjuti *milestone* tersebut, Pokja III ICCTF segera melanjutkan proses-proses dalam rangka restrukturisasi di antaranya penyelenggaraan *Steering Committee Meeting* serta *Implementation Support Mission* oleh World Bank.

Steering Committee Meeting pertama di tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2019 di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto 1-2, Bappenas. Pertemuan dipimpin oleh Sekretaris Menteri PPN/Sekretaris Utama Bappenas. Hal-hal penting yang diumumkan pada pertemuan tersebut

yaitu *update* terhadap kemajuan usulan restrukturisasi program COREMAP-CTI dan susunan dewan pengelola program COREMAP-CTI internal Pemerintah Indonesia yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala LIPI terkait penetapan struktur Tim Pengarah Nasional, Tim Teknis Kelompok Kerja, dan Tim Pengelola Program COREMAP-CTI tahun 2018. Surat Keputusan tersebut mengakomodasi keterlibatan Bappenas dalam usulan program ke depannya. Dalam susunannya, Tim Pengarah Nasional diketuai oleh Sesmen PPN/Sestama Bappenas dan dibantu oleh Sestama LIPI sebagai Wakil Ketua. Tim Teknis Kelompok Kerja diketuai Bersama oleh Kepala P2O LIPI dan Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas yang membawahi 4 Pokja yakni (a) Pokja Infrastruktur, (b) Pokja Pengelolaan Hibah, (c) Pokja Riset, dan (d) Pokja Pengembangan Kapasitas.



Steering Committee Meeting COREMAP-CTI



Implementation Support Mission COREMAP-CTI

(28 Januari - 22 Februari 2019)

Pada tanggal 28 Januari – 22 Februari 2019, Tim World Bank yang terdiri dari representatif Kantor Pusat World Bank di Washington D.C dan Kantor World Bank Indonesia melakukan *Implementation Support Mission* terhadap program COREMAP-CTI Loan IBRD 83360 dan Grant TF015470.

Agenda Misi terdiri dari kunjungan lapangan dan serangkaian pertemuan. Tim World Bank diterima oleh Dr. Dirhamsyah selaku Kepala Pusat Penelitian Oseanografi – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2O – LIPI) sekaligus Koordinator

PMO COREMAP-CTI. Selain mereviu capaian implementasi dan rencana kerja proyek yang didanai oleh pinjaman, misi bertujuan untuk menyetujui poin-poin penting yang diperlukan dalam penyusunan proposal restrukturisasi komponen hibah GEF yang akan mengarah ke amandemen perjanjian hukum dan implementasi efektif dari program. Pada akhir Misi, dihasilkan kesepakatan dalam bentuk rencana aksi tindak lanjut yang tertuang pada Aide Memoire. Berdasarkan identifikasi kemajuan restrukturisasi, Misi memperkirakan penandatanganan amandemen perjanjian akan dilaksanakan pada pertengahan tahun 2019.



Implementation Support Mission COREMAP-CTI World Bank

Joint Review ESSF Document

(8 Maret 2019)

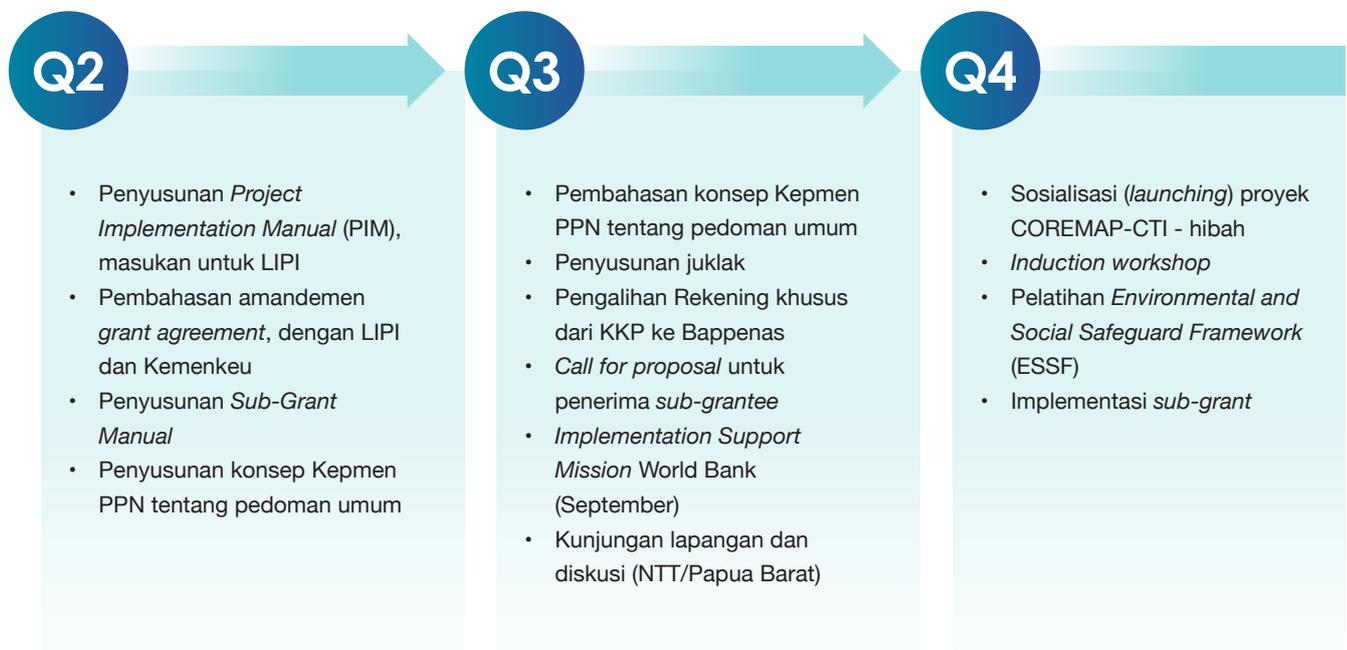
Salah satu rencana aksi yang telah dilaksanakan yaitu *re-disclose* dokumen Kerangka Perlindungan Sosial dan Lingkungan/*Environmental and Social Safeguard Framework* (ESSF) di situs pelaksana proyek, sebagai salah satu syarat dalam penyusunan proposal restrukturisasi. Pada tanggal 8 Maret 2019, dilaksanakan *Joint Review* dokumen ESSF yang bertujuan untuk menginput/menyesuaikan dokumen saat ini dengan perkembangan kondisi proyek terbaru serta tambahan lainnya yang relevan dengan kegiatan perlindungan lingkungan dan sosial. Pertemuan dilaksanakan di Kantor LIPI Raden Saleh, Jakarta dan dipimpin oleh Kepala Subdit Tata Kelola Laut dan Pesisir Bappenas.

Pertemuan tersebut menghasilkan Draft Dokumen ESSF yang selanjutnya dikirimkan ke World Bank untuk permintaan *No Objection* dan dipublikasi di situs ICCTF pada tanggal 15 Maret 2019 (dokumen dapat diunduh pada tautan <https://www.icctf.or.id/portfolio/coremap-cti-essf/> untuk

versi Bahasa Inggris dan <https://www.icctf.or.id/portfolio/coremap-cti/> untuk versi Bahasa Indonesia). Pada saat ini, draft dokumen tersebut menunggu *No Objection Letter* dari World Bank untuk kemudian dipublikasikan kembali di situs World Bank dan pengelola program (LIPI dan ICCTF) dalam bentuk dokumen final.



Rencana Tindak Lanjut



Hibah GEF ADB

Diskusi Dokumen Restrukturisasi

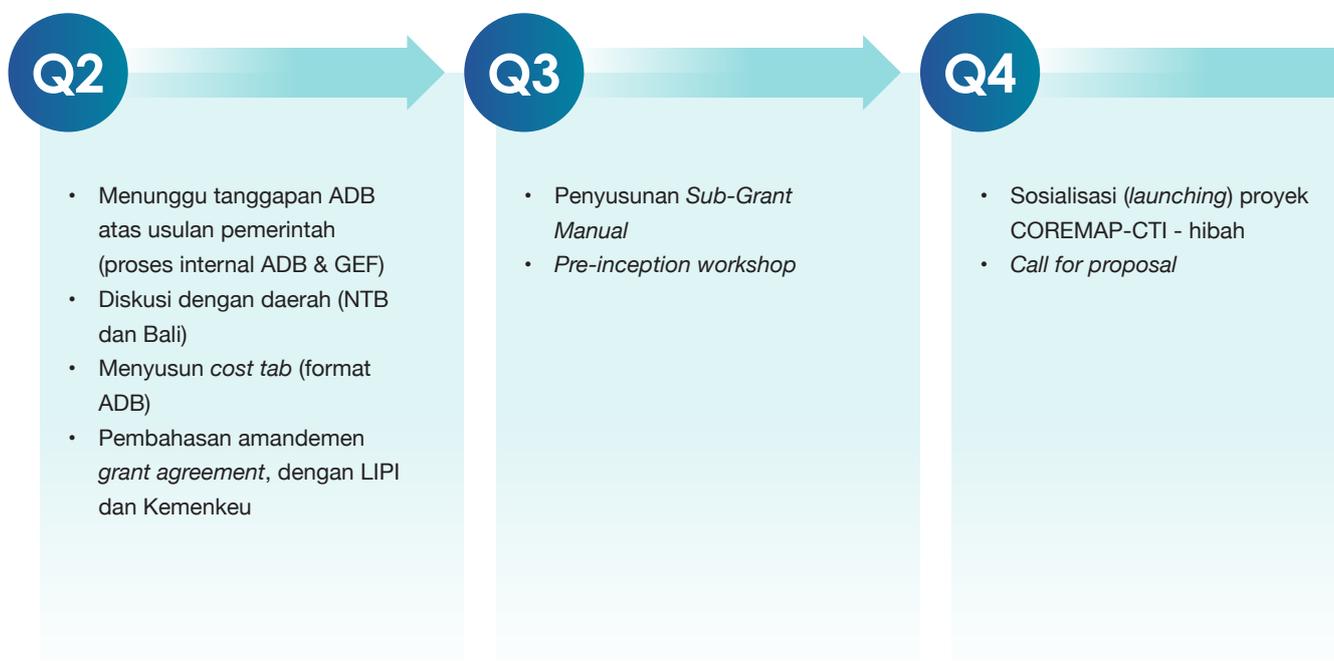
(11 dan 21 Februari 2019)

Sebelumnya pada tanggal 23 Agustus 2018, ADB, ICCTF, Bappenas dan KKP melaksanakan pertemuan di kantor utama ADB di Manila, Filipina, untuk mendiskusikan proposal restrukturisasi dan memastikan detail dari rencana kegiatan. Dokumen yang dihasilkan kemudian mendapatkan tanggapan dari pihak KKP dan Bappenas. Salah satunya dalam pertemuan pada tanggal 11 Februari 2019 di Ruang Rapat SS Lantai 1 Bappenas. Berdasarkan pertemuan tersebut diusulkan beberapa penyesuaian terbaru untuk proposal restrukturisasi yang kemudian dibahas kembali pada tanggal 21 Februari 2019.

Pertemuan kedua yang bertempat di Ruang Rapat MWA – ICCTF Lantai 5 Bappenas ini dipimpin oleh Direktur Kelautan

dan Perikanan Bappenas, Ibu Sri Yanti JS. Sementara perwakilan ADB dihadiri oleh Mr Arunkumar Abraham (ADB/ GEF *Senior Environment Specialist*), Mrs Nao Ikemoto (*Officer-in-charge*, Indonesia Resident Mission), dan Ibu Helena Lawira (*Project Officer of Water Sector*, Indonesia Resident Mission). Agenda rapat kembali mengkaji proposal restrukturisasi dari segi *outcomes* dan *output*, anggaran, *baseline* data dan tenggat waktu bagi dokumen untuk diusulkan oleh ADB kepada GEF. Hasil rapat tersebut adalah usulan-usulan untuk proposal restrukturisasi terbaru dan saat ini dokumen *Revised Proposal for Major Amendment* telah dikirimkan serta dalam proses kajian antara pihak ADB dan GEF.

Rencana Tindak Lanjut



Progres dan Capaian Program *Blended Finance*

Penyusunan Kerangka Desain *Blended Financing*

Dalam satu dekade terakhir, sejumlah inovasi strategi untuk pembiayaan terkait pesisir dan laut telah dicetuskan untuk menyambut tantangan *Blue Economy*. Pemerintah Indonesia saat ini sedang menerapkan metode *Blended Financing* - dimana modal yang berasal dari publik maupun filantropis digunakan untuk memacu investasi dalam rangka mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs). Namun, menurut survei terbaru yang dilakukan oleh OECD, praktik *Blended Finance* pada saat ini belum menargetkan semua target SDGs secara merata dan hanya terfokus pada infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. RARE bersama dengan Kementerian PPN/Bappenas sepakat bahwa sumber daya alam dalam aspek SDGs merupakan aset yang sangat vital dan dapat dijadikan sebagai modal investasi.

Untuk menjawab tantangan ini, RARE menyatakan dukungannya kepada Kementerian PPN/Bappenas untuk menyusun kerangka desain implementasi *Blended Financing* pertama yang menargetkan isu konservasi kelautan dan

pengelolaan perikanan berkelanjutan. Mekanisme ini akan mendukung pencapaian target SDG 14 ("*Life Below Water*"), dan diharapkan menjadi contoh pendanaan inovatif untuk investasi yang mendukung target-target SDGs lainnya dalam waktu yang akan datang.

Pada Tanggal 11 Maret 2019, dalam acara diskusi Tri Hita Karana di Hotel Shangrila - Jakarta, Menteri PPN/Bappenas memberikan paparan mengenai rencana penerapan inisiatif *Blended Financing* di bidang konservasi kelautan di Indonesia. Dalam pertemuan skala internasional ini, Menteri PPN/Bappenas menekankan pentingnya menjaga konservasi keanekaragaman hayati laut di Indonesia. Oleh sebab itu, Menteri PPN/Bappenas menghimbau kerjasama antara pemerintah, pihak filantropis, sektor swasta dan komunitas dalam penerapan skema *Blended Financing*. Bekerjasama dengan RARE, Bappenas berencana akan melaksanakan *pilot projects Blended Financing* di beberapa titik lokasi di Indonesia.



Rencana Tindak Lanjut

Pada tanggal 10-15 April 2019, Kementerian PPN/Bappenas akan melakukan serangkaian pertemuan dengan pihak RARE di Washington D.C, Amerika Serikat untuk mendiskusikan terkait kelanjutan rencana penyusunan kerangka desain *Blended Financing*.

Penggalangan Dana (Fundraising)



Submit Impact Program GEF 7 – Sustainable Cities, berkolaborasi dengan UNDP dan World Bank

Global Environment Facility (GEF) pada bulan November 2018 kembali membuka *Call for Expression of Interest* (EOI) untuk GEF-7 *Impact Program* (IP). Pada *call for EOI* untuk GEF-7 IP ini disampaikan beberapa hal yaitu:

- Negara yang berminat terhadap IP dapat menyampaikan EOI dengan melengkapi form yang telah disediakan oleh GEF. *Deadline* penyampaian form EOI adalah pada 31 Januari 2019;
- EOI kemudian akan direviu oleh *lead agency* masing-masing *Impact Program* melalui proses konsultasi intensif dengan GEF *Secretariat*.

Salah satu *Impact Program* yang akan diajukan oleh Indonesia kepada GEF *Secretariat* adalah *Impact Program Sustainable Cities*. Dalam rangka menyusun *Expression of Interest* (EOI) untuk disampaikan kepada GEF *Secretariat*, ICCTF berkolaborasi dengan beberapa mitra pembangunan, antara lain World Bank dan UNDP.

Program *Sustainable Cities* yang diusulkan akan menekankan pada perbaikan proses perencanaan pembangunan perkotaan melalui pemanfaatan data dan informasi daya dukung dan daya tampung Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup wilayah perkotaan. Dalam

konteks ini, kerangka Pembangunan Rendah Karbon (*Low Carbon Development*) akan menjadi tema dalam pembangunan perkotaan yang sejalan dengan *New Urban Agenda* dan *Paris Agreement* untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Peran ICCTF dalam proposal tersebut adalah sebagai salah satu mitra dari World Bank selaku *Implementing Agency* untuk proposal *Sustainable Cities Impact Program* tersebut. Salah satu peran yang dapat dilakukan oleh ICCTF antara lain memfasilitasi kegiatan berbasis riset (*research actions*) untuk kawasan perkotaan, bekerjasama dengan lembaga *think tank* dan Universitas, yang hasilnya dapat menjadi rekomendasi kebijakan bagi Kementerian PPN/Bappenas dalam mewujudkan kota berkelanjutan (*sustainable cities*). Usulan EOI tersebut secara resmi telah disampaikan oleh Kementerian PPN/Bappenas kepada GEF *Focal Point* Indonesia pada bulan Desember 2018. Konsep EOI yang telah disampaikan kepada GEF *Focal Point* tersebut selanjutnya disempurnakan pada bulan Januari 2019 dan selanjutnya telah dikirimkan oleh GEF *Focal Point* kepada GEF *Secretariat* sebelum batas waktu yang ditetapkan, yaitu 31 Januari 2019.

Submit Project Concept Note kepada AFD: Low Carbon Policy Framework on Waste, Air Pollution and Energi Sector (LCDI-WAPES)

Untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam merumuskan intervensi kebijakan dalam kerangka kerja pembangunan rendah karbon, khususnya untuk sektor-sektor tertentu, termasuk air, polusi udara dan energi, ICCTF dan New Climate Economy (NCE) telah menyusun sebuah *concept note proposal* yang berjudul “*Support to the Development of Low Carbon Policy Framework in Indonesia –Water, Air Pollution and Energy Sector (LCDI-WAPES)*” dengan jumlah anggaran yang diusulkan sebesar EUR 1.500.000 untuk durasi 2 tahun (2019-2020). Usulan proyek ini telah disampaikan kepada AFD pada bulan Maret 2019 sebagai tindak lanjut dari *Letter of Intent* antara Pemerintah Indonesia dan AFD yang ditandatangani pada 14 Oktober 2018, selama Pertemuan Tahunan IMF-WBG.

Proyek ini dilatarbelakangi oleh masih diperlukannya intervensi kebijakan agar Indonesia beralih dari pendekatan *business-as-usual* (BAU) ke yang lebih inovatif serta menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Agar transisi Indonesia berjalan lancar menuju jalur pembangunan baru ini, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas juga akan mengarusutamakan kerangka kerja, strategi, dan inisiatif pembangunan rendah karbon ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Judul Proyek

Support to the Development of Low Carbon Policy Framework in Indonesia–Water, Air Pollution and Energy Sector (LCDI-WAPES)



Tujuan Proyek

1. Memperkuat pengembangan perencanaan kebijakan tentang kerangka inisiatif rendah karbon untuk tiga sektor spesifik: sektor energi, air, dan polusi udara, berdasarkan studi ilmiah, termasuk menghasilkan rekomendasi kebijakan tematik yang efektif.
2. Menghasilkan skenario investasi yang diperlukan untuk menjembatani rekomendasi kebijakan ke fase implementasi.
3. Menerapkan kerangka kerja pembangunan rendah karbon ke dalam proyek percontohan di sektor energi, air, dan polusi udara, sebagai "laboratorium hidup".



Durasi Proyek

2 tahun

(2019-2020)



Lokasi Proyek

40 kota

di Indonesia



Informasi Budget

EUR

1.500.000



Implementing Agency

1. New Climate Economy (NCE)
2. Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)



Development Partner

Agence Française de Développement
(AFD)

Identifikasi fase selanjutnya dengan UKCCU

Dukungan pendanaan dari UKCCU untuk program TEGAK yang saat ini berjalan akan berakhir pada tahun 2019. UKCCU telah menyampaikan bahwa dukungan UKCCU untuk Indonesia pada fase berikutnya akan berada di bawah payung kerja sama LCDI (*Low Carbon Development Indonesia*). Selama ini, ICCTF telah terlibat dalam berbagai kegiatan dalam pengembangan LCDI. Oleh karena itu, ICCTF diharapkan juga dapat terlibat dalam kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan UKCCU dalam kerangka LCDI.

Identifikasi awal telah dilakukan terkait peran dan kontribusi ICCTF dalam kerangka LCDI, antara lain: dukungan terhadap kerangka kebijakan, dukungan terhadap *pilot program* pelaksanaan LCDI di daerah, serta dukungan dan fasilitasi kerja sama dengan pihak swasta. Berbagai pengalaman dan keahlian ICCTF yang diperoleh dari berbagai pelaksanaan *pilot project* bekerjasama dengan LSM dan Universitas menjadi nilai tambah bagi ICCTF dalam melaksanakan *pilot project* LCDI bekerjasama dengan pemerintah daerah.

Potensi pendanaan *Blue Carbon*

ICCTF berkesempatan menyampaikan kondisi kebijakan nasional *Blue Carbon* di Indonesia dalam *Inception Meeting* pada tanggal 13 Februari 2019 bersama The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) dan Department of Energy & Environment (DOEE) Australia. Pada pertemuan tersebut, Pemerintah Australia menyatakan ketertarikannya untuk bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam lingkup *blue carbon*. Sebagai tindak lanjut, pada tanggal 14-15 Februari 2019 dilaksanakan Pertemuan *Technical Scoping* di Bali bersama dengan Kementerian/ Lembaga, Akademisi dan Organisasi Non-Pemerintah untuk berbagi informasi mengenai kajian dan penelitian yang telah dilakukan di Indonesia berkaitan dengan *blue carbon*.

Pemerintah Indonesia bersama dengan Pemerintah Australia kemudian mendiskusikan tindak lanjut kerjasama dari segi kebijakan dan riset.

Disamping itu, CRC University of Rhode Island juga turut menyampaikan ketertarikannya untuk mengetahui perkembangan upaya pengelolaan pesisir dan laut di Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, ICCTF menyampaikan bahwa Pembangunan Rendah Karbon telah menjadi salah satu prioritas di dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024. Kedua belah pihak membahas kemungkinan potensi kerjasama di masa mendatang berkaitan untuk pengelolaan pesisir dan laut di Indonesia.

Potensi pendanaan *Renewable Energy*

Pemerintah Indonesia dan EIB telah menandatangani *Letter of Intent* (LoI) pada Oktober 2018 lalu yang dilaksanakan di tengah rangkaian agenda Annual Meeting IMF-WBG 2018 di Bali. Perjanjian ini bertujuan untuk mempromosikan inisiatif di bidang perubahan iklim dan perlindungan lingkungan. Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, ICCTF telah melakukan peninjauan kerja sama dengan European Investment Bank (EIB) melalui serangkaian pertemuan dan konsultasi antar pihak. Pertemuan dengan Delegasi EIB telah dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2019. Sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut, ICCTF berupaya menentukan *channeling entity* yang dipersyaratkan oleh EIB untuk penyaluran *soft loan* dalam pembiayaan proyek energi

terbarukan di Indonesia, dimana *channeling entity* tersebut merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

ICCTF telah melakukan koordinasi secara kontinu dengan beberapa BUMN dan Lembaga Keuangan, diantaranya adalah dengan PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Lembaga Penjamin Ekspor Impor Indonesia (LPEII), dan Bahana Sekuritas, Bank BNI dan BNI Sekuritas, Bank BRI, serta beberapa pertemuan dengan Sekretariat PINA. Pada periode ke depan, ICCTF akan terus melakukan elaborasi serta menindaklanjuti hasil pertemuan koordinasi dan berkonsultasi dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan proses kerja sama tersebut.



Komunikasi, *Outreach* & Kemitraan

Partisipasi dalam UN-PAGE Ministerial Conference, Cape Town (menghasilkan rekomendasi Cape Town Action Pathways towards 2030)

Delegasi Kementerian PPN/Bappenas dan ICCTF menghadiri Ministerial Conference pada tanggal 10 Januari 2019 sekaligus menjadi representasi Indonesia sebagai negara mitra baru UN PAGE.

Pertemuan dibuka oleh Direktur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup, Ms. Nosipho Ngcaba, dilanjutkan dengan arahan dari Menteri Lingkungan Hidup Afrika Selatan, H.E. Nomvula Paula Mokonyane, serta sambutan dari pihak UN, yaitu UN Resident Coordinator Afrika Selatan, Acting Executive Director UNEP dan Direktur Jenderal ILO. Beberapa hal yang mengemuka dari pembukaan tersebut antara lain:

- Transisi menuju *green economy* dan pembangunan rendah karbon sangat signifikan dalam merespon perubahan dan mengatasi tantangan pembangunan saat ini. Proses transisi tersebut harus dilaksanakan secara inklusif, yang memerlukan modifikasi dari struktur politik dan ekonomi, serta pelestarian lingkungan.
- Partnership for Action on Green Economy (PAGE) merupakan respon terhadap agenda Rio+20, di mana lima lembaga UN bekerja sama untuk membantu negara dalam proses transisi menuju *green economy*, serta memastikan koherensi program dan menghindari duplikasi. PAGE memberikan dukungan terhadap koordinasi kebijakan yang lebih baik, mengidentifikasi faktor pendukung potensial untuk reformasi sektor industri, serta peningkatan kapasitas.
- Transisi menuju *green economy* dapat memberikan peluang dan kesempatan lapangan kerja baru. *Green growth* perlu didukung oleh *practical learning* dan inovasi, sehingga pendekatan yang harus dilakukan adalah inklusif dan tidak lagi *business as usual*.
- Diperlukan kepemimpinan (*leadership*), kolaborasi, dan kemitraan yang kuat dan berkelanjutan agar berbagai peluang dalam proses transisi menuju *green economy*, khususnya pada sektor dunia usaha dan tenaga kerja dapat dikelola dengan baik.



UN PAGE ministerial conference menghasilkan dokumen Cape Town Action Pathways Towards 2030 yang dapat diunduh pada laman: <https://page2019.itcilo.org/wp-content/uploads/2019/02/PAGE-Ministerial-Conference-2019-Cape-Town-Action-Pathways-Towards-2030.pdf>

Dukungan terhadap SDGs

Pada triwulan 1 tahun 2019, ICCTF melalui dukungan pendanaan hibah DANIDA telah melaksanakan beberapa kegiatan dukungan terhadap SDGs dalam rangka implementasi dan penyusunan roadmap SDGs 2017-2030. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama ICCTF dan ESP3 melalui perjanjian "Support from Environmental Support Program Phase 3 (ESP3) to the Indonesia Climate Change

Trust Fund (ICCTF) for Core Programme and Formulation of a Roadmap for the 2017 - 2030 Indonesia SDGs" pada tanggal 3 Juli 2018. Beberapa kegiatan utama yang telah dilaksanakan pada triwulan ini antara lain *talkshow* Menteri PPN/Kepala Bappenas di acara *Prime Talk* Metro TV, 2 (dua) Publikasi SDGs di Kompas, SDGs Corner dan Konsultasi Publik KLHS RPJMN 2020-2024.

Kegiatan *Talkshow/Prime Talk* SDGs di Metro TV

(21 Februari 2019)

Sekretariat SDGs telah mengadakan program *Talkshow* TPB/SDGs di stasiun TV Nasional Metro TV pada acara *Prime Talk* dengan judul “Pembangunan Lingkungan Hidup dan SDGs di Indonesia” pada tanggal 21 Maret 2019. *Talkshow* ini mengangkat tema kemitraan multipihak untuk pencapaian TPB/SDGs di Indonesia dengan menekankan integrasi dimensi sosial, ekonomi, lingkungan dan *governance*. *Talkshow* SDGs ini menghadirkan narasumber yaitu Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Duta Besar Denmark untuk Indonesia. Menteri PPN/Kepala Bappenas menyampaikan langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencapai target SDGs tahun 2030, salah satunya adalah mengintegrasikan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon kedalam RPJMN 2020-2024. Duta Besar Denmark untuk Indonesia memberikan tanggapan terkait dukungan Pemerintah Denmark terhadap pelaksanaan SDGs di Indonesia dan potensi kerjasama kedepannya untuk mencapai target SDGs tersebut.



Publikasi SDGs di Media Cetak Kompas dengan judul “Inklusi dan Akselerasi Pembangunan Berkelanjutan”

(21 Februari 2019)



Publikasi SDGs telah dimuat di Media Cetak Kompas dengan “Judul Inklusi dan Akselerasi Pembangunan Berkelanjutan” yang terbit pada tanggal 21 Februari 2019. Publikasi ini memuat pemberitaan tentang penyelenggaraan SDGs Annual Conference 2018 pada tanggal 15-16 Desember 2018. Konferensi yang dihadiri sekitar 750 peserta dari berbagai kalangan ini membicarakan tentang perkembangan, pengalaman terbaik, kebijakan dan strategi untuk akselerasi pencapaian SDGs.

Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku koordinator pelaksana Pelaksanaan Pencapaian SDGs dalam konferensi tahun 2018 ini juga menyampaikan bahwa SDGs telah diarusutamakan dalam dokumen pembangunan, baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Rencana Aksi Nasional (RAN) SDGs telah diluncurkan dan hingga kini 18 provinsi telah menyelesaikan Rencana Aksi Daerah (RAD). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun juga telah berperan besar menginisiasi forum dan model, agar pelaksanaan SDGs Indonesia menjadi rujukan negara lain.

Publikasi SDGs di Media Cetak Kompas dengan judul “Kolaborasi untuk Wujudkan Agenda 2030” (13 Maret 2019)

Publikasi SDGs telah dimuat di Media Cetak Kompas dengan Judul “Kolaborasi untuk Wujudkan Agenda 2030” pada tanggal 13 Maret 2019. Pemberitaan ini menjelaskan tentang komitmen yang disampaikan Menteri PPN/Bappenas untuk mencapai target SDGs tahun 2030. Menteri PPN/ Kepala Bappenas menekankan pentingnya partisipasi dan kolaborasi semua pihak untuk mendukung agenda besar ini. Selain itu, disampaikan pula dorongan kepada SDGs Center yang berada di berbagai perguruan tinggi untuk berperan aktif melakukan kajian-kajian lintas bidang keilmuan serta memperkuat proses penyusunan kebijakan dan advokasi dalam pelaksanaan SDGs. Untuk inovasi pembiayaan, *Innovative Financing Lab* diharapkan dapat membantu Bappenas sebagai SDGs *Financing Hub* yang memberikan pertimbangan mengenai instrumen pembiayaan yang tepat bagi isu tertentu. Selanjutnya, penekanan pada kontinuitas pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang menjadi kunci dalam pencapaian target dan indikator SDGs ini.



Penyelenggaraan Kegiatan SDGs Corner (Seminar & Pameran) (28 Februari 2019)

Kementerian PPN/Bappenas melalui Sekretariat SDGs telah melaksanakan kegiatan SDGs Corner pada tanggal 28 Februari 2019 di Aula Serbaguna Gedung Bappenas Jakarta dimana kegiatan tersebut di ikuti oleh 200 peserta dan 9 booth pameran. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mempererat hubungan kerjasama dan komunikasi antar pemangku kepentingan pencapaian TPB/SDGs di Indonesia; dan saling berbagi informasi antar pemangku kepentingan terkait pelaksanaan SDGs. Kegiatan ini dimulai dengan acara konsultasi publik 4 pilar pembangunan SDGs dan dilanjutkan dengan acara *talkshow best practice* pelaksanaan SDGs. Sesi *talkshow* ini membahas 4 topik pembelajaran utama SDGs yaitu: Pilar Sosial, Pilar Ekonomi, Pilar Lingkungan serta Pilar Hukum dan Tata Kelola.

Tidak hanya diskusi, kegiatan ini juga dikemas dengan acara pemutaran video, *games*, *photo booth* dan tarian *flash mob* untuk memeriahkan suasana. Selain itu, diselenggarakan juga pameran yang diikuti oleh 9 lembaga yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, MM Sustainability Univ. Trisakti, Filantropi Indonesia, ICCTF, SDGs, 2030 Youth Force Indonesia, Lingkar Temu Kabupaten Lestari, Institut Kapal Perempuan, dan Pemerintah Provinsi Banten. Dengan antusiasme para peserta yang hadir, diharapkan para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan SDGs dapat saling bersinergi dan berkolaborasi untuk mencapai target SDGs Tahun 2030.



Dukungan terhadap Konsultasi Publik KLHS RPJMN 2020-2024 yang diadakan di Hotel Mandarin

(28 Februari 2019)

Kementerian PPN/Bappenas melalui Direktorat Lingkungan Hidup telah menyelenggarakan Konsultasi Publik KLHS RPJMN 2020 – 2024 di Hotel Mandarin Oriental Jakarta pada tanggal 28 Februari 2019. Tujuan dari kegiatan konsultasi publik ini adalah: (a) menyampaikan hasil KLHS yang akan menjadi masukan dalam proses penyusunan RPJMN 2020-2024; (b) Mensosialisasikan metodologi dan menyamakan persepsi terkait proses penyusunan KLHS; dan (c) Mendapatkan tanggapan dan masukan dari publik dan pakar untuk penyempurnaan dokumen KLHS. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas, perwakilan Kementerian/Lembaga, Sekretariat RAN GRK, Sekretariat RAN API, Sekretariat ICCTF, Tim Pakar, Tim Pemodelan *System Dynamics*, Tim Pemodelan Spasial, Tim Kajian Potensi *Hazard*, Tim Kajian *Loss and Damage*, dan mitra pembangunan serta NGO.

Kegiatan ini dibuka oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam. Penyampaian Hasil Sementara KLHS dilakukan oleh Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas. KLHS ini mendapatkan banyak tanggapan dari para pakar dan masukan dari para pihak yang hadir. Kesimpulan hasil sementara KLHS adalah Pembangunan belum berkelanjutan bila masih mengikuti pola pembangunan masa lalu, maka diperlukan adanya lompatan kebijakan untuk memenuhi target-target pembangunan ekonomi hijau. Dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung pada pelaksanaan pembangunan, ternyata sejalan dan mendukung dapat pertumbuhan ekonomi. Masih ada kelemahan-kelemahan dalam penyusunan KLHS saat ini, antara lain masih terfokus pada isu *land-based* dan data biodiversitas Indonesia bagian timur sulit diperoleh tetapi sudah ada pendekatan alternatif metode, yaitu dengan KBA. Oleh karena itu, sangat diharapkan kerja sama dari berbagai pihak untuk melengkapi dan menyempurnakan data, informasi, dan analisis KLHS RPJMN ini.



Dukungan pada Peluncuran Dokumen Kajian Pembangunan Rendah Karbon Indonesia



ICCTF mendukung pelaksanaan acara Peluncuran Laporan Kajian Pembangunan Rendah Karbon Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 26 Maret 2019 di Bappenas. Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 350 peserta dari berbagai Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Pakar dan Universitas, Media, Organisasi Internasional, Mitra Pembangunan, Organisasi Non-Pemerintah dan Pihak Swasta. Kegiatan juga dihadiri oleh duta besar dan pejabat tinggi dari berbagai instansi, antara lain Duta Besar Denmark, Duta Besar Inggris, dan Duta Besar Norwegia, Kepala LKPP, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, serta Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim.

Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA Bappenas dalam kesempatannya menyampaikan bahwa dalam periode 50 tahun terakhir, Indonesia mengalami tren pertumbuhan ekonomi yang positif. Namun demikian, Indonesia masih dihadapkan berbagai tantangan di sektor lingkungan seperti tingkat polusi udara dan air yang tinggi, penyusutan hutan, urbanisasi yang tidak teratur, berkurangnya sumber daya alam, serta perubahan iklim dan dampak turunannya. Indonesia juga masih menjadi salah satu negara penghasil GRK terbesar di dunia.

Jika tanpa mempertimbangkan parameter daya dukung dan daya tampung, skenario pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat secara bertahap sampai 5,7% pada tahun 2045.

Namun, apabila dilakukan permodelan dengan asumsi dasar tanpa intervensi kebijakan rendah karbon, namun mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung sebagai salah satu parameter skenario laju pertumbuhan ekonomi, maka diproyeksikan akan menurun hingga mencapai 4,3%.

Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA Bappenas juga menekankan bahwa Indonesia harus beralih dari model ekonomi *Business As Usual* ke pola inovatif dan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia menginisiasi Pembangunan Rendah Karbon (LCDI) sebagai paradigma baru dalam pembangunan menggunakan 4 skenario LCDI:



Dalam kerangka Pembangunan Rendah Karbon, terdapat 5 kebijakan utama sebagai strategi untuk mewujudkan visi pembangunan rendah karbon, yakni:

1. Transisi Menuju Energi Terbarukan dan Efisiensi Energi;
2. Perlindungan Hutan, Moratorium Gambut dan Meningkatkan Reforestasi;
3. Penanganan Sampah dan Pengelolaan Industri;
4. Meningkatkan produktivitas lahan pertanian;
5. Perbaikan Kelembagaan dan Tata Kelola.

Menteri PPN dalam pidato kuncinya secara lebih lanjut berkomitmen untuk melakukan kajian untuk mengetahui biaya yang telah digunakan dalam menangani permasalahan bencana hidrometeorologi yang diakibatkan oleh parameter-parameter meteorologi, seperti curah hujan, kelembaban, temperatur, dan angin. Skema pembangunan rendah karbon diharapkan dapat mencegah kerugian akibat bencana yang disebabkan kelalaian manusia.

“Upaya pengurangan emisi harus dimulai dari diri kita sendiri seperti menggunakan transportasi umum serta menjaga kelestarian laut dan sungai dari sampah plastik. Perilaku tersebut diharapkan dapat menjadi bagian integral dari implementasi pembangunan rendah karbon”.

Terdapat beberapa pembelajaran dari pelaksanaan proyek ICCTF sebagai percontohan implementasi PRK, salah satunya adalah proyek ICCTF di Kabupaten Kupang dan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur melalui pengembangan sistem budidaya padi SRI (*System of Rice Intensification*) sebagai alternatif produksi pertanian ramah lingkungan dimana melalui intervensinya sejak tahun 2016, telah berhasil meningkatkan produktivitas padi hampir 200%. Program ini menjadi upaya menstabilkan produksi padi di Indonesia dengan pengelolaan tanaman yang adaptif, sehingga disamping meningkatkan perekonomian petani, juga sekaligus menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).



Dukungan pada Penandatanganan Nota Kesepakatan Pembangunan Rendah Karbon dengan Pemerintah Daerah

ICCTF mendukung Kementerian PPN/ Bappenas dalam inisiasi Pembangunan Rendah Karbon (PRK). Salah satu kegiatan yang penting berkaitan dengan inisiasi PRK pada awal tahun 2019 adalah penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon antara Menteri PPN/Bappenas dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Gubernur Provinsi Jawa Tengah.

Penandatanganan Nota Kesepakatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2019 untuk Sulawesi Selatan, dan 14 Februari 2019 untuk Jawa Tengah. Nota Kesepakatan tersebut difokuskan pada beberapa poin kerja sama, antara lain:

- a. Penyiapan integrasi kebijakan Pembangunan Rendah Karbon di daerah;
- b. Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon di daerah;
- c. Penguatan sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) online Pembangunan Rendah Karbon di daerah;
- d. Dukungan terhadap penyiapan kegiatan Pembangunan Rendah Karbon, termasuk kerja sama dengan swasta.

Untuk Jawa Tengah, terdapat tambahan fokus kerja sama yaitu dalam hal penanganan sampah dan limbah plastik sebagai bagian dari Pembangunan Rendah Karbon.

Beberapa Provinsi lain yang ditargetkan untuk menandatangani Nota Kesepakatan tentang Pembangunan Rendah Karbon antara lain Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Bali, Papua dan Papua Barat.



Keuangan & Audit

Laporan Audit Tahun 2019

Sebagai bentuk pertanggungjawaban yang menganut prinsip transparansi dan akuntabel, Laporan Keuangan ICCTF setiap tahunnya diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Internasional dan Badan Pemeriksa Keuangan Negara. Pada tahun 2019, audit Laporan Keuangan ICCTF dilakukan untuk Dana Hibah DANIDA Periode Januari – Maret 2019 oleh Kantor Akuntan Publik Wisnu Karsono Soewito & Rekan (JPA International) dengan opini **wajar tanpa pengecualian**. Untuk Laporan Keuangan yang sudah diaudit bisa dilihat dalam lampiran.

DANIDA - SGDs Audited Financial Report Q1 - 2019

 <p>WISNU KARSONO SOEWITO & REKAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS Audit, Accounting, Tax, Consulting Indonesia</p>	<p style="text-align: center;"><u>INDEPENDENT AUDITORS REPORT</u></p> <p>No.: 00019/2.1229/AU.1/04/0358-2/1/IV/2019</p> <p>To: OPERATION DIRECTOR Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)</p> <p>We have audited the accompanying financial statement of the Additional Support From Environmental Support Programme Phase 3 (ESP3) to the Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) for Core Programme and Formulation of a Roadmap for the 2017 – 2030 Indonesian SDGs DANIDA Trust Fund, which comprise the statements of activities and statements of cash flow for the 3 (three) months period of January 01 to March 31, 2019 and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.</p> <p>Management's Responsibility for the Financial Statement</p> <p>Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statement in accordance with the cash basis which is a comprehensive basis of accounting other than Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.</p> <p>Auditor's Responsibility</p> <p>Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.</p> <p>An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessments of the risks of the material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risks assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.</p>	<p>We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.</p> <p>Opinion</p> <p>In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, statement of activities of the Additional Support From Environmental Support Programme Phase 3 (ESP3) to the Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) for Core Programme and Formulation of a Roadmap for the 2017 – 2030 Indonesian SDGs and statement of cash flow for the 3 (three) months period of January 01 to March 31, 2019 in conformity with the cash basis which is a comprehensive basis of accounting other than Indonesian Financial Accounting Standards.</p> <p>Other Matter</p> <p>This report is intended solely for the information and use of the Management of Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF), and should not be used for any other purpose.</p>
		<p>WISNU KARSONO SOEWITO & REKAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS License No. 586/KM.1/2018</p>  <p>R. Dwi Karsono Soewito, CPA Public Accountant Registration Number : AP.0358</p> <p>Jakarta, April 01st, 2019</p>



Informasi Keuangan Triwulan I Tahun 2019

Sebagai satu-satunya Lembaga Dana Perwalian Perubahan Iklim Nasional di Indonesia, ICCTF selalu memegang prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap kegiatan terkait keuangan sehingga, prinsip tata kelola organisasi dapat tercapai.

Bagian Keuangan ICCTF secara rutin mengadministrasikan, menyiapkan dan melaporkan semua kegiatan pelaksanaan secara tertib dan sesuai dengan kaidah tata kelola yang baik. Pada tahun 2019 ICCTF mengelola dana Rupiah Murni APBN sebesar 34,47 M dan dana Hibah Luar Negeri sebesar 34,97 M. Total dana yang dikelola tahun 2019 adalah 69,47 M. Capaian pada kuartal 1 tahun 2019 adalah sebesar 12,38 M yaitu 18% dari total dana yang dikelola.

Untuk rincian alokasi dana tersebut, bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Sources of Fund (Existing)	Budget Allocation 2019	Disbursement Q1-2019	
			IDR	%
1	APBN - Sekretariat ICCTF	7.039.405.000	1.824.340.078	26%
2	APBN - DM ICCTF	3.000.000.000	59.214.430	2%
3	APBN - Pokja I ICCTF	10.430.595.000	1.243.313.575	12%
4	APBN - Pokja II ICCTF	4.500.000.000	54.904.942	1%
5	APBN - Pokja III ICCTF	9.500.000.000	95.060.242	1%
6	DANIDA - SDGs	2.480.808.808	2.480.808.808	100%
7	USAID	7.534.738.695	2.284.982.674	30%
8	UKCCU	24.961.779.495	4.343.426.535	17%
TOTAL		69.447.326.998	12.386.051.284	18%



**SUPPORTING
THE INDONESIAN
GOVERNMENT
FOR A BETTER CLIMATE**

www.icctf.or.id

ICCTF Sekretariat

Lippo Kuningan, Lt. 15,
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12,
Jakarta 12940, Indonesia
P +62 (21) 8067 9314
F +62 (21) 8067 9315
E sekretariat@icctf.or.id
W www.icctf.or.id



ICCTF_ID



icctfofficial



ICCTF



Indonesia Climate Change Trust Fund